

2022



# INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

## PROVINSI KEPULAUAN RIAU



+ + + + + + +

2022



# INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

## PROVINSI KEPULAUAN RIAU



# Indeks

## Pembangunan Manusia

### Provinsi Kepulauan Riau 2022

**ISSN** : 2776-5539  
**No. Publikasi** : 2100.2316  
**Katalog** : 4102002.21

**Ukuran Buku** : 14,8 cm x 21 cm  
**Jumlah Halaman** : xii + 73 halamann

**Naskah:**  
Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau

**Penyunting:**  
Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau

**Desain Kover:**  
Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau

**Diterbitkan Oleh:**  
© Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau

**Pencetak Oleh:**  
CV. Bintang Printing

**Sumber Ilustrasi:**  
freepik.com

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

# Tim Penyusun

“Indeks Pembangunan Manusia  
Provinsi Kepulauan Riau 2022”

## **Pengarah**

Darwis Sitorus, S.Si, M.Si

## **Penanggung Jawab**

Purwo Astono, SST

## **Penyunting**

Nunik Sri Rahayu, SST, M.Si

## **Pengolah Data**

Nunik Sri Rahayu, SST, M.Si  
Utary Hafiza, SST

## **Penulis Naskah**

Nunik Sri Rahayu, SST, M.Si  
Utary Hafiza, SST

## **Perwajahan dan Tata Letak**

Utary Hafiza, SST

## **Infografis**

Yeni Putriyanti, S.Stat

## **Desain Kover**

Ismiana Putri, SST



# Kata Pengantar

Publikasi “Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Riau 2022” merupakan publikasi yang disajikan berkala setiap tahun. Publikasi ini menyajikan informasi mengenai capaian dan perkembangan pembangunan manusia Provinsi Kepulauan Riau hingga tingkat kabupaten/kota.

Data yang digunakan sebagian besar bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenasi) Maret 2022. Selain itu, digunakan juga data yang bersumber dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) keadaan Agustus 2022 (utamanya terkait ketenagakerjaan).

Publikasi ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dan akademisi dalam menyusun strategi kebijakan daerah guna mencapai pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan yang menempatkan penduduk sebagai fokus utamanya.

Kepada semua pihak yang telah berkontribusi, disampaikan apresiasi dan terima kasih atas kerjasama dan partisipasinya sehingga publikasi ini dapat diselesaikan tepat waktu. Semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak dan memberikan dampak nyata untuk mewujudkan masyarakat Kepulauan Riau yang berkualitas dan sejahtera.

Tanjungpinang, Mei 2023  
Kepala Badan Pusat Statistik  
Provinsi Kepulauan Riau



**Darwis Sitorus, S.Si, M.Si**



# Daftar Isi

Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel.....	viii
Daftar Gambar.....	ix
Daftar Lampiran.....	xi
<b>1. Pendahuluan.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Tujuan.....	8
<b>2. Pengukuran Pembangunan Manusia.....</b>	<b>9</b>
2.1 Perkembangan Pengukuran Pembangunan.....	11
2.2 Pembangunan Manusia sebagai Perluasan Pilihan.....	14
2.3 Perkembangan Pembangunan Manusia di Dunia dan Indonesia.....	17
2.4 Dimensi dan Indikator Pembangunan Manusia di Indonesia.....	21
2.5 Manfaat Indeks Pembangunan Manusia.....	24
<b>3. Capaian Pembangunan Manusia Kepulauan Riau.....</b>	<b>25</b>
3.1 Indeks Pembangunan Manusia Kepulauan Riau.....	27
3.2 Capaian Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat Tumbuh	32
3.3 Capaian Dimensi Pengetahuan.....	34
3.4 Capaian Dimensi Standar Hidup Layak Mulai Meningkat...	38
<b>4. Capaian Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota.....</b>	<b>41</b>
4.1 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Kepu- lauan Riau.....	43
<b>5. Profil Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota</b>	
<b>Lampiran.....</b>	<b>69</b>

# Daftar Tabel

Tabel 5.1	Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Kabupaten Karimun, 2022 .....	55
Tabel 5.2	Beberapa Indikator Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Kabupaten Karimun, 2021-2022 .....	56
Tabel 5.3	Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Kabupaten Bintan, 2022 .....	57
Tabel 5.4	Beberapa Indikator Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Kabupaten Bintan, 2021-2022 ...	58
Tabel 5.5	Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Kabupaten Natuna, 2022 .....	59
Tabel 5.6	Beberapa Indikator Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Kabupaten Natuna, 2021-2022..	60
Tabel 5.7	Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Kabupaten Lingga, 2022 .....	61
Tabel 5.8	Beberapa Indikator Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Kabupaten Lingga, 2021-2022 ...	62
Tabel 5.9	Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Kabupaten Kep. Anambas, 2022.....	63
Tabel 5.10	Beberapa Indikator Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Kabupaten Kep. Anambas, 2021-2022.....	64
Tabel 5.11	Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Kota Batam, 2022 .....	65
Tabel 5.12	Beberapa Indikator Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Kota Batam, 2021-2022.....	66
Tabel 5.13	Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Kota Tanjungpinang, 2022 .....	67
Tabel 5.14	Beberapa Indikator Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Kota Tanjungpinang, 2021-2022 .....	68

# Daftar Gambar

Gambar 3.1	Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi di Pulau Sumatera, 2022 .....	28
Gambar 3.2	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Riau, 2016-2022.....	30
Gambar 3.3	Pertumbuhan IPM Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2016-2022.....	30
Gambar 3.4	Perkembangan Umur Harapan Hidup saat Lahir Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional (Tahun), 2016-2022 .....	33
Gambar 3.5	Pertumbuhan per Tahun UHH saat Lahir Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2016-2022 .....	33
Gambar 3.6	Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional (Tahun), 2016-2022.....	35
Gambar 3.7	Pertumbuhan per Tahun Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2016-2022 .....	36
Gambar 3.8	Perkembangan Harapan Lama Sekolah Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional (Tahun), 2016-2022.....	37
Gambar 3.9	Pertumbuhan per Tahun Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2016-2022 .....	38
Gambar 3.10	Perkembangan Pengeluaran per Kapita per Tahun yang Disesuaikan Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional (Juta Rupiah), 2016-2022 .....	39
Gambar 3.11	Pertumbuhan per Tahun Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2016-2022 .....	40
Gambar 4.1	Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2022.....	44

## Daftar Gambar

Gambar 5.1	Perkembangan IPM Kabupaten Karimun, 2010-2022..	55
Gambar 5.2	Pertumbuhan IPM Kabupaten Karimun, 2011-2022 (persen).....	55
Gambar 5.3	Perkembangan IPM Kabupaten Bintan, 2010-2022.....	57
Gambar 5.4	Pertumbuhan IPM Kabupaten Bintan, 2011-2022 (persen).....	57
Gambar 5.5	Perkembangan IPM Kabupaten Natuna, 2010-2022....	59
Gambar 5.6	Pertumbuhan IPM Kabupaten Natuna, 2011-2022 (persen).....	59
Gambar 5.7	Perkembangan IPM Kabupaten Lingga, 2010-2022.....	61
Gambar 5.8	Pertumbuhan IPM Kabupaten Lingga, 2011-2022 (persen).....	61
Gambar 5.9	Perkembangan IPM Kabupaten Kep. Anambas, 2010-2022 .....	63
Gambar 5.10	Pertumbuhan IPM Kabupaten Kep. Anambas, 2011-2022 (persen) .....	63
Gambar 5.11	Perkembangan IPM Kota Batam, 2010-2022 .....	65
Gambar 5.12	Pertumbuhan IPM Kota Batam, 2011-2022 (persen)....	65
Gambar 5.13	Perkembangan IPM Kota Tanjungpinang, 2010-2022 ..	67
Gambar 5.14	Pertumbuhan IPM Kota Tanjungpinang, 2011-2022 (persen).....	67

# Daftar Lampiran

Lampiran 1 Sampling Error Beberapa Indikator, 2022 .....	71
--	----

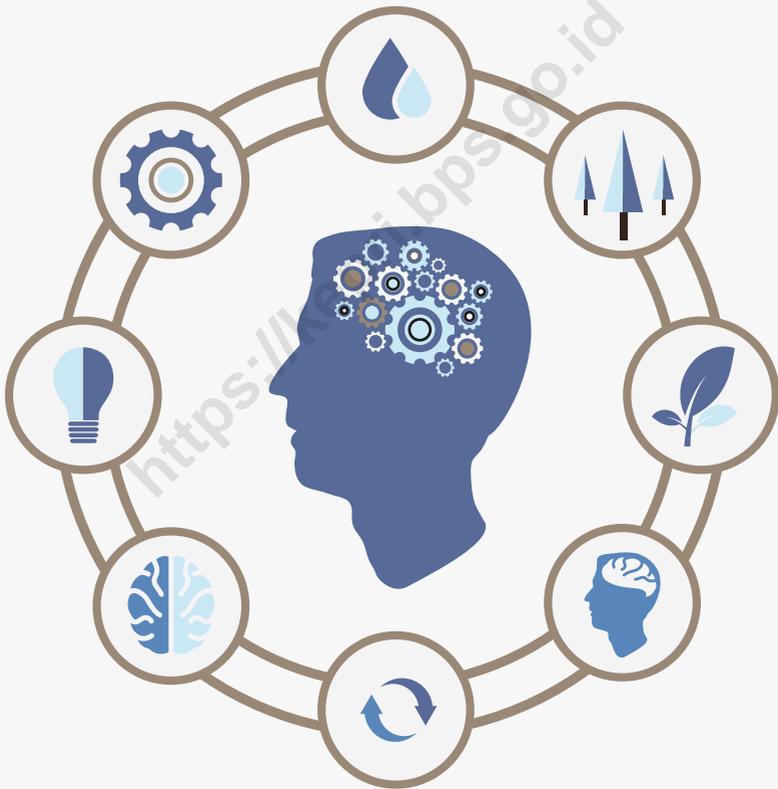
<https://kepri.bps.go.id>



# 1



## PENDAHULUAN



Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu ukuran standar pembangunan manusia yang ditetapkan oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui United Nation Development Programme (UNDP).





# Pendahuluan

## 1.1 Latar Belakang

Pada dua dekade terakhir ini, banyak kajian yang dilakukan oleh dunia internasional terkait dengan manusia sebagai objek dan tujuan utama dalam pembangunan. Munculnya paradigma baru tersebut dipicu oleh kegagalan konsep pembangunan yang hanya menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi dimana sebelum tahun 1970-an keberhasilan pembangunan semata-mata hanya diukur dari tingkat pertumbuhan *Gross National Product* (GNP). Faktanya, masih dijumpai negara-negara dengan tingkat pertumbuhan GNP yang tinggi namun kualitas manusianya masih rendah. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan seharusnya memang tidak hanya diukur dari tingginya pertumbuhan ekonomi saja tetapi juga peningkatan kualitas manusianya dan sudah sepantasnya manusia menjadi tujuan utama dalam pembangunan.

Keberhasilan pembangunan khususnya pembangunan manusia dapat dinilai secara parsial dengan melihat seberapa besar permasalahan yang paling mendasar di masyarakat tersebut dapat teratasi. Permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya adalah kemiskinan, pengangguran, buta huruf, ketahanan pangan, dan penegakan demokrasi. Namun persoalannya adalah capaian pembangunan manusia secara parsial sangat bervariasi, dimana sebagian aspek pembangunan

tertentu berhasil dan sebagian aspek pembangunan lainnya gagal. Pertanyaannya yaitu bagaimana menilai keberhasilan pembangunan manusia secara keseluruhan.

Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui *United Nation Development Programme* (UNDP) menetapkan suatu ukuran standar pembangunan manusia yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI). Indeks ini dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu: umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Indikator angka harapan hidup merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat. Selanjutnya, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah mengukur dimensi pengetahuan, sedangkan indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan digunakan untuk mengukur standar hidup layak.

Modal manusia (*human capital*) merupakan salah satu faktor penting dalam proses pertumbuhan ekonomi (Solow Model). Modal manusia yang berkualitas diyakini menjadikan kinerja ekonomi yang lebih baik. Kualitas modal manusia ini dapat diamati dari aspek tingkat pendidikan, kesehatan, dan tingkat kemiskinan. Demi memacu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas perlu pula dilakukan pembangunan manusia. Untuk itu, dibutuhkan suatu kebijakan pemerintah yang mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Luasnya cakupan pembangunan manusia menjadikan peningkatan IPM sebagai manifestasi dari pembangunan manusia yang dapat ditafsirkan juga sebagai keberhasilan dalam meningkatkan kemampuan dalam memperluas pilihan-pilihan

(*enlarging the choices of the people*). Seperti diketahui, beberapa faktor penting dalam pembangunan yang sangat efektif bagi pembangunan manusia adalah pendidikan dan kesehatan. Dua faktor penting ini merupakan kebutuhan dasar manusia yang perlu dimiliki agar mampu meningkatkan potensinya.

Untuk meningkatkan IPM semata-mata tidak hanya melihat pada peningkatan pertumbuhan ekonomi karena pertumbuhan ekonomi baru merupakan syarat perlu. Agar pertumbuhan ekonomi suatu daerah sejalan dengan pembangunan manusia, maka pertumbuhan ekonomi daerah itu harus disertai dengan syarat cukup yaitu pemerataan pembangunan daerah. Pemerataan pembangunan daerah dapat menjamin bahwa semua penduduk dapat menikmati hasil-hasil pembangunan daerah.

Tinggi rendahnya nilai IPM tidak terlepas dari program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Proses desentralisasi tampaknya telah membuka potensi-potensi wilayah untuk berkembang secara aktif dan mandiri. Kompetisi antarwilayah semakin bergairah menuju ke arah yang lebih baik. Namun perlu disadari, perubahan angka IPM tidak bisa terjadi secara instan tetapi secara bertahap sesuai dengan proses kebijakan yang berjalan. Untuk itu, program-program pembangunan manusia harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan terus dipantau pelaksanaannya sehingga lebih terarah.

Adanya otonomi daerah dimana pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan kebijakan-kebijakan yang bermuatan kearifan lokal, diharapkan

mampu mengurangi kesenjangan capaian pembangunan manusia antarkota dan kabupaten-kabupaten di Indonesia. Seperti contoh wilayah perkotaan yang sarat dengan fasilitas pembangunan memiliki capaian pembangunan manusia yang lebih tinggi dibanding daerah lain di sekitarnya. Daya tarik kota membawa dampak pada berpindahnya penduduk yang berkualitas ke kota. Sebagai konsekuensinya, daerah penyangga dan wilayah kabupaten memiliki capaian pembangunan yang relatif rendah.

Sesuai dengan visi pembangunan jangka panjang Provinsi Kepulauan Riau 2005-2021, maka sudah selayaknya pembangunan daerah menempatkan manusia sebagai titik sentral pembangunan yang bercorak dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dengan kata lain, rakyat harus diikutsertakan dalam seluruh proses pembangunan. Artinya, rakyat bukan hanya sebagai alat untuk mencapai hasil akhir pembangunan tetapi juga sebagai tujuan akhir dari pembangunan itu sendiri.

Untuk dapat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau, tentunya dibutuhkan masyarakat yang tidak hanya unggul dari segi kuantitas tetapi juga maju dari segi kualitas. Pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan kualitas manusia, baik dari aspek fisik (kesehatan), aspek intelektualitas (pendidikan), aspek kesejahteraan ekonomi (berdaya beli), maupun aspek moralitas (iman dan takwa). Seluruh upaya pemerintah daerah tersebut merupakan prasyarat penting untuk mencapai masyarakat Kepulauan Riau yang berkualitas.

Saat ini tampaknya perhatian pemerintah daerah terpusat pada isu pembangunan manusia. Hal ini ditandai dengan diikutkannya IPM sebagai salah satu alokator dana alokasi umum (DAU) untuk mengatasi kesenjangan keuangan wilayah (*fiscal gap*). Alokator lainnya adalah luas wilayah, jumlah penduduk, produk domestik regional bruto dan indeks kemahalan konstruksi. Wilayah dengan IPM rendah secara perlahan dapat mengejar ketertinggalannya karena memperoleh alokasi dana yang berlebih. Meskipun demikian, hal itu masih sangat tergantung dengan strategi pembangunan yang dijalankan oleh wilayah tersebut. Dengan demikian, cukup menarik untuk melihat pencapaian pembangunan manusia yang telah dilakukan selama ini. Selain itu, menarik pula untuk dilihat perkembangan masing-masing komponen IPM dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan IPM.

Terkait dengan pelaksanaan desentralisasi pemerintahan, perlu dilihat hasil-hasil pemerataan pembangunan manusia antarwilayah, khususnya pada level provinsi dan kabupaten/kota. Harapannya, dengan meningkatnya kesadaran akan demokrasi, desentralisasi menjadi salah satu pilihan dalam upaya menggerakkan roda pembangunan. Proses desentralisasi tampaknya telah membuka potensi-potensi wilayah untuk berkembang secara aktif dan mandiri. Kompetisi antarwilayah makin dinamis sebagai ajang adu kebijakan pembangunan manusia yang efektif dan efisien sehingga mampu mengurangi kesenjangan capaian pembangunan manusia antarkota dan kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau.

Secara umum, publikasi ini akan menyajikan data dan analisis mengenai capaian IPM baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Publikasi ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam merumuskan permasalahan dalam upaya untuk meningkatkan kinerja pembangunan manusia serta menjadi alat bantu perencanaan (*planning tool*) pembangunan yang lebih mengakomodasi dimensi pembangunan manusia, misalnya melalui peningkatan anggaran pada sektor-sektor yang berhubungan langsung dengan pembangunan manusia, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat pra sejahtera agar dapat mandiri secara ekonomi.

### 1.2 Tujuan

Adapun tujuan disusunnya publikasi Indeks Pembangunan Manusia tahun 2022 yaitu menyediakan data IPM dan komponen penyusunnya untuk level provinsi hingga kabupaten/kota.



# PENGUKURAN PEMBANGUNAN MANUSIA

Indeks Pembangunan Manusia dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu:

## PENGETAHUAN

Dimensi ini dapat dilihat dari Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

## UMUR PANJANG DAN HIDUP SEHAT

Dimensi ini dapat dilihat dari Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH)

## STANDAR HIDUP LAYAK

Dimensi ini dapat dilihat dari Pengeluaran per kapita yang disesuaikan





# Pengukuran Pembangunan Manusia

## 2.1 Perkembangan Pengukuran Pembangunan

Pada era sebelum tahun 1970, Todaro dan Smith (2003) mengungkapkan bahwa paradigma pembangunan semata-mata dipandang hanya sebagai fenomena ekonomi. Perhatian dunia pada saat itu berfokus pada diskusi mengenai pendapatan, modal, pertumbuhan ekonomi, dan berbagai hal yang terkait dengan ekonomi. Namun, dalam perkembangannya menyebabkan munculnya fenomena sosial yang cenderung bertolak belakang dengan fenomena ekonomi. Data empiris menunjukkan bahwa beberapa negara yang mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga menghadapi masalah tingginya pengangguran, kemiskinan, dan masalah sosial lain yang berhubungan dengan manusia. Banyak pihak mulai menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menjadi jaminan terhadap perbaikan taraf hidup penduduk di suatu negara.

Munculnya fenomena tersebut menunjukkan bahwa pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi tidak selalu mendatangkan kesejahteraan masyarakat. Setidaknya terdapat dua alasan yang mendasari hal tersebut. Pertama, angka pendapatan nasional memang bermanfaat untuk banyak tujuan tetapi tidak mengungkapkan penerima hasilnya. Kedua, penilaian kinerja yang hanya didasarkan pada indikator pendapatan nasional sering menimbulkan penafsiran yang keliru sebab ada aspek

penting lain yang tidak tergambarkan oleh indikator tersebut, seperti akses terhadap layanan kesehatan yang lebih baik, akses yang lebih besar ke pengetahuan, mata pencaharian yang lebih aman, kondisi pekerjaan yang lebih baik, keamanan dari tindak kejahatan dan kekerasan fisik, waktu senggang yang memuaskan, dan perasaan ikut serta dalam kegiatan ekonomi, budaya, dan politik.

Konsep pembangunan yang kurang komprehensif dengan hanya berfokus pada aspek ekonomi memunculkan pemikiran baru dalam melihat pembangunan. Konsep pembangunan manusia muncul untuk memperbaiki kekurangan tersebut dengan melihat pembangunan secara lebih komprehensif. Konsep pembangunan manusia tidak hanya memperhitungkan aspek pendapatan, tetapi juga memperhitungkan aspek kesehatan dan pendidikan. Konsep pembangunan manusia kali pertama diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 melalui laporan yang berjudul *Human Development Report* (HDR). Dalam laporannya, UNDP menekankan bahwa manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Dengan dasar tersebut, pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, bukan hanya sebagai input dari pembangunan. Oleh karena itu, dalam sudut pandang pembangunan manusia, tujuan utama dari pembangunan adalah untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi masyarakat untuk menikmati umur panjang, hidup sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif (UNDP, 1990).

Gagasan pembangunan manusia yang dikemukakan oleh UNDP pada tahun 1990 memberikan pemahaman baru tentang cara

pandang melihat pembangunan. Cara pandang pembangunan manusia berbeda dengan pendekatan pembangunan konvensional seperti pertumbuhan ekonomi, pembentukan modal manusia, pengembangan sumber daya manusia, kesejahteraan masyarakat atau kebutuhan dasar manusia. Perbedaan cara pandang pendekatan tersebut antara lain:

- Pertumbuhan ekonomi merupakan hal yang diperlukan dalam pembangunan manusia, tetapi pertumbuhan ekonomi saja tidaklah cukup. Kemajuan manusia dalam masyarakat mungkin saja masih rendah meskipun Produk Domestik Bruto (PDB) atau pendapatan per kapita tumbuh tinggi, atau sebaliknya.
- Teori pembentukan modal manusia dan pengembangan sumber daya manusia memandang manusia terutama sebagai alat dan bukan sebagai tujuan. Kedua pendekatan berfokus pada sisi penawaran yang memandang manusia sebagai sumber daya untuk menghasilkan produksi. Akan tetapi, manusia memiliki nilai yang lebih dari sekadar barang modal untuk kegiatan produksi. Manusia juga merupakan tujuan akhir dan penerima manfaat dari proses ini.
- Pendekatan kesejahteraan masyarakat lebih memandang manusia sebagai penerima manfaat dari proses pembangunan daripada sebagai agen di dalamnya. Pendekatan ini lebih menekankan kebijakan distribusi daripada struktur produksi.
- Pendekatan kebutuhan dasar berfokus pada kelompok barang dan jasa yang dibutuhkan oleh suatu kelompok masyarakat, seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, perawatan kesehatan, dan air. Pendekatan ini berfokus pada penyediaan barang dan jasa dibandingkan masalah pilihan manusia

## 2.2 Pembangunan Manusia sebagai Perluasan Pilihan

Gagasan tentang pembangunan manusia merupakan manifestasi dari konsep kapabilitas yang dikemukakan oleh Amartya Sen (1987). Menurut Sen, kapabilitas merupakan kemampuan untuk mencapai sesuatu yang dianggap bernilai. Hal yang mendasar bagi hidup manusia pada dasarnya adalah kemampuan. Sen menyebut konsep ini dalam banyak terminologi, yaitu kesempatan, daya, dan juga sebagai kebebasan. Kapabilitas seseorang merupakan kombinasi dari berbagai kesempatan yang bisa diperoleh manusia untuk menjalankan fungsi dalam hidupnya. Dengan kata lain, kapabilitas adalah sebuah bentuk kebebasan untuk mencapai berbagai pilihan dalam menjalankan fungsi hidup.

Untuk memahami konsep kapabilitas, Sen memberikan contoh analisisnya pada kasus orang yang berpuasa dan orang yang memang mengalami kelaparan. Seseorang yang berpuasa misalnya, orang tersebut menjalani situasi yang hampir sama untuk hidup seperti mereka yang miskin dan terpaksa lapar, dalam hal jumlah makanan atau gizi yang mereka konsumsi. Akan tetapi mereka memiliki 'perangkat kapabilitas' (*capability set*) lebih besar dibanding mereka yang miskin karena kelompok pertama dapat memilih makan lebih enak sedangkan yang kedua tidak. Terdapat perbedaan yang jelas diantara mereka, yakni yang berpuasa mengalami lapar karena pilihan atau kehendaknya sendiri sedangkan yang benar-benar menderita kelaparan tidak memiliki pilihan.

Sen membagi konsep kapabilitas menjadi dua, yaitu *well-being freedom* dan *agency freedom*. *Well-being freedom* merupakan kemampuan untuk mencapai sesuatu yang sangat menentukan kesejahteraan seseorang. Sementara *agency freedom* didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk melakukan atau mencapai sesuatu yang dianggap bernilai.

Dalam konteks pembangunan, Sen memandang kapabilitas sebagai salah satu elemen paling mendasar dalam hidup manusia karena terkait dengan kemampuan atau daya untuk meraih kehidupan yang dianggap bernilai. Pendekatan kapabilitas fokus pada persoalan bagaimana individu memiliki kapabilitas untuk melakukan sesuatu, atau memilih melakukan hal-hal yang dianggap penting untuk kesejahteranya, bukan hanya pada persoalan seberapa banyak harta kekayaan atau pendapatan yang dimiliki. Dengan kata lain, kapabilitas mengacu pada kemungkinan individu untuk merealisasikan dirinya, yaitu memilih yang penting untuk kesejahteranya. Kapabilitas juga mengacu pada hal-hal yang harus dibangun, bukan hanya dimensi kesejahteraan saja, tetapi juga kebebasan sipil dan politik, seperti kebebasan berpartisipasi dalam politik, kebebasan berpendapat, dan lain-lain.

Dengan konsep kapabilitas, Sen berpendapat bahwa ada tiga aspek yang terkait dengan pembangunan, yaitu:

- a. Keberfungsian (*functionings*) adalah suatu keadaan *doing and being* seperti dipelihara dengan baik, terlindungi, cukup makan, dan bebas dari malaria. Hal tersebut harus dapat dibedakan dengan komoditas yang digunakan untuk mencapainya karena misalnya 'bersepeda' berbeda dengan 'memiliki sepeda';

- b. Kemampuan (*capabilities*) mengacu pada serangkaian fungsi berharga yang dimiliki seseorang. Kemampuan seseorang mewakili kebebasan individu untuk memilih antara kombinasi fungsi berbeda yang dimilikinya untuk alasan yang dianggap bernilai; dan
- c. Sumber daya (*resources*) yang merupakan input dan nilainya tergantung pada kemampuan untuk mengubah sumber daya menjadi fungsi yang berharga.

Sen menggunakan contoh seseorang yang bersepeda untuk menggambarkan aspek yang terkait dengan pembangunan. Agar dapat bersepeda (*functioning*), seseorang harus memiliki sepeda (*resource*). Namun, orang tersebut juga harus memiliki kemampuan untuk mengubah sepeda menjadi sesuatu yang berfungsi. Bersepeda terkait dengan kemampuan seseorang dalam hal fisiologi dan kesejahteraan pribadi (seperti kesehatan), norma sosial, dan lingkungan fisik (seperti kualitas jalan). Dengan konsep tersebut, Sen mendefinisikan pembangunan manusia sebagai perluasan kebebasan yang dinikmati oleh manusia. Kebebasan terkait dengan berbagai faktor sosial ekonomi seperti akses pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan politik.

Selain Sen, Mahbub ul Haq (1995) juga menjadi tokoh penting yang berperan dalam memformulasikan paradigma pembangunan manusia. Haq melihat semakin banyak bukti yang tidak mendukung keyakinan awal tentang kekuatan *trickle down* dari kekuatan pasar untuk memberikan manfaat ekonomi yang merata dan menghapuskan kemiskinan.

Mahbub ul Haq mengartikan pembangunan manusia dengan konsep pilihan manusia (*people choices*). Ia berpendapat bahwa pembangunan manusia merupakan proses perluasan pilihan yaitu kebebasan berpolitik, partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, pilihan untuk berpendidikan, bertahan hidup dan sehat, menikmati standar hidup layak, serta berpartisipasi di dalam kehidupan komunitas dan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka. Pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia dilihat sebagai ruang pilihan-pilihan, sebagaimana manusia memiliki berbagai potensi dalam dirinya untuk menentukan pilihan. Konsep kapabilitas yang dikemukakan oleh Sen dan konsep pilihan manusia yang dikemukakan oleh Haq menjadi dasar dalam paradigma pembangunan manusia yang diimplementasikan oleh UNDP. Berdasarkan konsep tersebut, UNDP mendefinisikan pembangunan manusia sebagai proses perluasan pilihan manusia.

### 2.3 Perkembangan Pengukuran Pembangunan Manusia di Dunia dan Indonesia

UNDP menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berdasarkan tiga dimensi, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Pada kali pertama IPM dirilis, ketiga dimensi tersebut diwakili dengan tiga indikator dalam penghitungan, yaitu Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), Angka Melek Huruf (AMH), dan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita. Metode agregasi yang dilakukan untuk menghitung IPM menggunakan rata-rata aritmetik.

**Gambar 1. Perkembangan Metodologi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) UNDP**



Sumber : Badan Pusat Statistik

Untuk memenuhi tuntutan perkembangan, UNDP melakukan penyempurnaan terhadap penghitungan IPM. UNDP tercatat telah lima kali melakukan penyempurnaan sejak kali pertama dirilis. Tahun 2010, UNDP melakukan perubahan yang cukup signifikan terhadap penghitungan IPM dengan tetap mempertahankan tiga dimensi yang sama tetapi mengubah indikator yang digunakan. Agregasi Angka Melek Huruf (AMH) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) diubah menjadi agregasi Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Sementara itu, PDB per kapita diubah menjadi angka Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Selain perubahan pada indikator, UNDP juga mengubah penghitungan agregasi IPM dari rata-rata aritmetik menjadi rata-rata geometrik.

Perubahan metodologi penghitungan IPM didasarkan pada alasan bahwa suatu indeks komposit harus mampu mengukur apa yang diukur. Dengan pemilihan metode dan variabel yang tepat, indeks yang dihasilkan akan relevan. Selain itu, terdapat dua hal mendasar yang menjadi alasan utama perubahan

metodologi penghitungan IPM. Pertama, beberapa indikator sudah tidak tepat lagi digunakan dalam penghitungan IPM. Angka Melek Huruf (AMH) sudah tidak relevan lagi menjadi indikator perkembangan pendidikan karena kurang menggambarkan kualitas pendidikan. Sebelum revisi penghitungan pada tahun 2010, AMH di sebagian besar negara sudah tinggi sehingga tidak mampu membedakan tingkat pendidikan antarnegara dengan baik. Dalam konsep pembentukan indeks komposit, indikator yang tidak sensitif dalam membedakan akan menyebabkan indeks komposit menjadi tidak relevan. Dengan pertimbangan tersebut, indikator AMH perlu diganti dengan indikator lain yang representatif. Penggunaan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah dapat memberikan gambaran yang lebih relevan tentang dimensi pendidikan dan perubahannya.

Indikator berikutnya yang diganti adalah PDB per kapita. Indikator ini pada dasarnya merupakan pendekatan terhadap pendapatan masyarakat. Namun, konsep mendasar dalam penghitungan adalah PDB diciptakan dari seluruh faktor produksi yang menyertakan tenaga kerja dan investasi dari dalam dan luar negeri. Oleh karena itu, PDB per kapita kurang dapat menggambarkan pendapatan masyarakat. Penggunaan PNB yang menggantikan PDB dapat lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah, karena hanya memperhitungkan faktor produksi yang menyertakan tenaga kerja dan investasi dari dalam negeri.

Kedua, penggunaan rata-rata aritmetik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah pada suatu dimensi tertutupi oleh capaian yang tinggi dari dimensi lain. Sementara itu, konsep mendasar dalam pembangunan manusia

adalah pemerataan dimensi dan menghindari ketimpangan antardimensi. Penggunaan rata-rata aritmetik memungkinkan adanya transfer penilaian dalam capaian dari dimensi dengan capaian tinggi ke dimensi dengan capaian rendah, sehingga perlu diganti dengan rata-rata geometrik. Penggunaan rata-rata geometrik tidak serta merta dapat menutupi kekurangan pada suatu dimensi dengan dimensi lain yang unggul. Dengan kata lain, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang merata diperlukan keseimbangan antardimensi yang sama pentingnya.

Sejalan dengan konsep pembangunan manusia yang dipromosikan oleh UNDP, Indonesia mulai melakukan penghitungan IPM pada tahun 1996. Saat itu IPM dihitung secara berkala setiap tiga tahun di tingkat nasional dan provinsi. Pada tahun 1999, Indonesia menghitung IPM sampai dengan tingkat kabupaten/kota dan dilakukan untuk periode data 1996 dan 1999, kemudian dilanjutkan lagi pada tahun 2002 untuk data 2002. Sejak tahun 2004, IPM dihitung secara berkala setiap tahun sampai dengan level kabupaten/kota untuk memenuhi kebutuhan perencanaan pembangunan, terutama dalam penentuan besaran Dana Alokasi Umum (DAU). Sejak tahun data 2014, Indonesia mengaplikasikan metode penghitungan IPM yang diperbarui UNDP pada tahun 2010 dan untuk memenuhi ketersediaan data tahun sebelumnya dilakukan *backasting* untuk periode data 2010-2013.

**Gambar 2. Perkembangan Implementasi Penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia**



Sumber : Badan Pusat Statistik

## 2.4 Dimensi dan Indikator Pembangunan Manusia di Indonesia

Sejak kali pertama merilis IPM pada tahun 1990, UNDP menggunakan tiga dimensi pembentuk IPM. Ketiga dimensi ini merupakan pendekatan yang dipilih dalam penggambaran kualitas hidup manusia dan tidak mengalami perubahan hingga saat ini. Dimensi tersebut adalah:

- Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*);
- Pengetahuan (*knowledge*); dan
- Standar hidup layak (*decent standard of living*).

Penghitungan IPM yang dilakukan di Indonesia mengacu pada ketiga dimensi tersebut. Ketika UNDP melakukan perubahan dan penyempurnaan metode penghitungan IPM, Indonesia juga turut mengadopsi metode tersebut dengan mengacu pada penyempurnaan yang dilakukan oleh UNDP. Penghitungan yang dilakukan sejak tahun 2015 hingga saat ini mengadopsi

metodologi yang direvisi UNDP pada tahun 2014. UNDP menggunakan data Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita sebagai indikator pada dimensi standar hidup layak. Akan tetapi, data tersebut tidak tersedia di tingkat daerah sehingga digunakan indikator pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan sebagai alternatif. Indikator ini dapat dihitung hingga tingkat kabupaten/kota. Indikator pengeluaran riil per kapita juga mampu mencerminkan indikator pendapatan masyarakat dan menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai output dari kegiatan ekonomi. Adapun dalam penghitungan indeks pengeluaran digunakan batasan nilai maksimum dan minimum masing-masing Rp26.572.352 dan Rp1.007.436. Data rata-rata pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan dihitung berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) modul konsumsi bulan Maret, indeks harga konsumen, dan data harga komoditas nonmakanan hasil survei harga konsumen.

Dimensi umur panjang dan hidup sehat direpresentasikan oleh indikator umur harapan hidup saat lahir. Penggunaan umur harapan hidup sebagai indikator didasari oleh kepercayaan umum bahwa umur panjang merupakan hal yang berharga dan kenyataan bahwa terdapat berbagai faktor yang berkaitan erat dengan umur harapan hidup, seperti nutrisi yang cukup dan kesehatan yang baik.

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) merupakan rata-rata perkiraan lamanya waktu (dalam tahun) yang dapat dijalani oleh seseorang selama hidupnya. Penghitungan UHH dilakukan melalui pendekatan tidak langsung (*indirect estimation*). Standardisasi nilai UHH dilakukan dengan konversi menjadi

indeks harapan hidup yang dihitung berdasarkan nilai maksimum dan minimum UHH yang sesuai dengan standar UNDP, yaitu 85 tahun untuk nilai maksimum dan 20 tahun untuk nilai minimum.

Dimensi pengetahuan direpresentasikan oleh Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Kedua indikator tersebut merefleksikan kemampuan masyarakat untuk mengakses pendidikan, khususnya pendidikan formal. HLS menggambarkan kesempatan yang dimiliki masyarakat untuk menempuh jenjang pendidikan formal, sedangkan RLS menggambarkan stok modal manusia yang dimiliki oleh suatu wilayah.

Harapan Lama Sekolah adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak yang berumur 7 tahun, sementara rata-rata lama sekolah merupakan jumlah tahun yang dijalani oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menempuh pendidikan formal. Penghitungan indeks pendidikan didasarkan pada rata-rata indeks HLS dan indeks RLS dengan bobot yang sama. Adapun dalam penghitungan indeks HLS dan RLS digunakan batasan nilai maksimum dan minimum yang sama dengan standar UNDP. Nilai maksimum dan minimum untuk HLS masing-masing 18 tahun dan 0 tahun, sementara nilai maksimum dan minimum untuk RLS masing-masing 15 tahun dan 0 tahun. Sumber data yang digunakan untuk menghitung indikator HLS dan RLS adalah hasil Susenas bulan Maret serta data jumlah siswa yang menjalani pendidikan dengan bermukim dari Kementerian Agama dan hasil inventarisasi data sektoral di daerah.

## 2.5 Manfaat Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia menjadi salah satu indikator yang penting untuk melihat pembangunan dari sisi manusia. Setiap indikator komponen penghitungan IPM dapat dimanfaatkan untuk mengukur capaian pembangunan kualitas hidup manusia. Secara kontekstual, perkembangan IPM menunjukkan perubahan pilihan-pilihan masyarakat untuk menjalani kehidupan yang bernilai.

Dalam konteks pengambilan kebijakan, IPM merupakan salah satu indikator target pembangunan dalam pembahasan asumsi makro pemerintah dan DPR. IPM bersama dengan indikator pertumbuhan ekonomi, PDB per kapita, pertumbuhan investasi, kemiskinan, rasio gini, inflasi, dan pengangguran juga menjadi indikator penting dalam Kerangka Ekonomi Makro (KEM). Pemerintah terus mengevaluasi kemajuan KEM untuk memastikan arah pembangunan berjalan sesuai koridor yang tertuang dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Sementara itu, dalam konteks penganggaran pembangunan, IPM digunakan sebagai salah satu variabel dalam penentuan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU). Selain IPM, variabel lain yang digunakan dalam penentuan DAU adalah jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. DAU merupakan salah satu transfer dana pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah dalam mendanai pembangunan daerah.

3



# CAPAIAN PEMBANGUNAN MANUSIA KEPULAUAN RIAU



Indeks Pembangunan Manusia  
Kepulauan Riau Tahun 2022  
adalah

**76,46**



1. UHH Tahun 2022

**70,50**

2. HLS Tahun 2022

**12,99**

4. Pengeluaran Rill  
Perkapita tahun 2022

**Rp. 14,47 Juta**

3. RLS Tahun 2022

**10,37**



<https://kepri.bps.go.id>



# Capaian Pembangunan Manusia Kepulauan Riau

## 3.1 Indeks Pembangunan Manusia Kepulauan Riau

### Posisi Kepulauan Riau

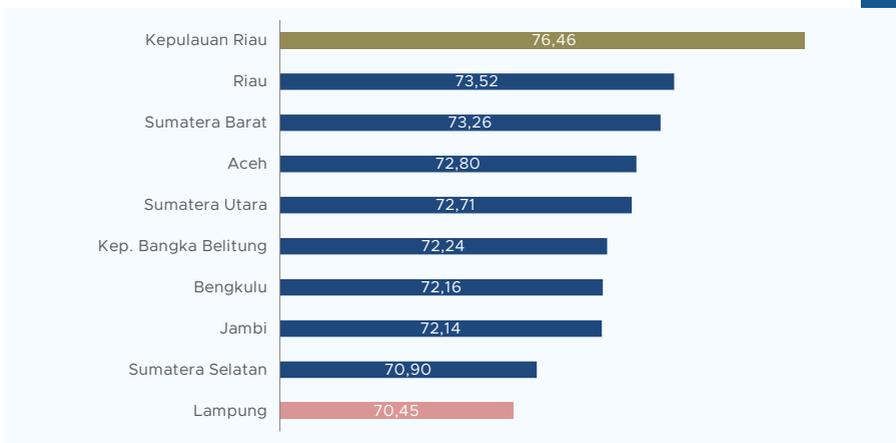
Berdasarkan skala internasional, capaian IPM dikategorikan menjadi empat kategori yaitu sangat tinggi ( $IPM \geq 80$ ), tinggi ( $70 \leq IPM < 80$ ), sedang ( $60 \leq IPM < 70$ ), dan rendah ( $IPM < 60$ ). Angka IPM Kepulauan Riau tahun 2022 termasuk dalam kategori tinggi. Capaian ini menghantarkan Kepulauan Riau berada pada posisi ke empat dari seluruh provinsi di Indonesia setelah Provinsi DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Kalimantan Timur.

Angka IPM Kepulauan Riau tahun 2022 sebesar 76,46 dimana angka IPM tersebut merupakan agregasi dari tiga dimensi, yaitu umur panjang dan hidup sehat (melalui indikator Umur Harapan Hidup-UHH), pengetahuan (melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah-RLS dan Harapan Lama Sekolah-HLS), serta standar hidup layak (melalui indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan). Umur harapan hidup Kepulauan Riau tahun 2022 sebesar 70,50, berarti bahwa bayi yang baru lahir pada tahun 2022 memiliki peluang untuk hidup hingga 70,50 tahun.

Lebih lama 0,38 tahun dibandingkan mereka yang lahir pada tahun 2021. Rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah masing-masing sebesar 10,37 dan 12,99. Rata-rata lama sekolah sebesar 10,37 menunjukkan penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 10,37 tahun, meningkat 0,19 tahun dibandingkan kondisi tahun 2021. Sementara itu, harapan lama sekolah sebesar 12,99 menunjukkan adanya harapan baru bahwa rata-rata anak berusia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,99 tahun, lebih lama 0,01 tahun dibandingkan kondisi tahun 2021. Terakhir, pengeluaran per kapita yang disesuaikan mencapai 14,469 juta rupiah per tahun, meningkat 347 ribu rupiah dibandingkan tahun 2021.

Gambar 3.1. menunjukkan bahwa IPM Kepulauan Riau menduduki posisi teratas di regional Sumatera jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya yang ada di Pulau Sumatera.

### Gambar 3.1 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi di Pulau Sumatera, 2022



Sumber : Badan Pusat Statistik

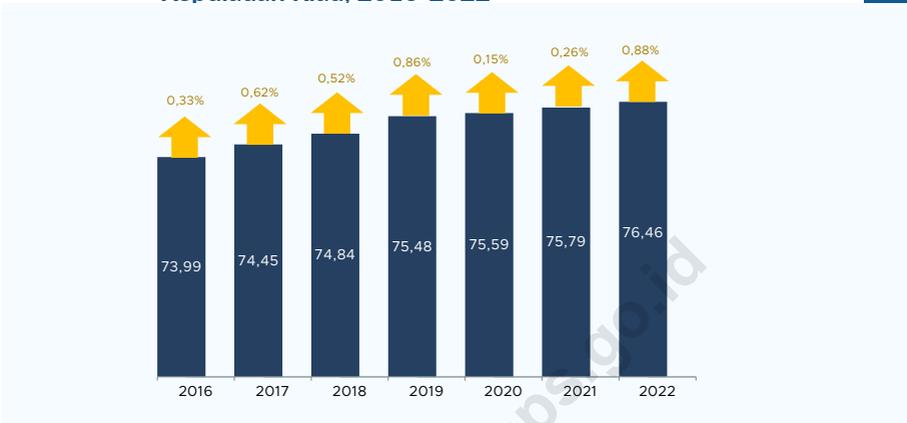
Hal tersebut menjadi kebanggaan mengingat Kepulauan Riau tergolong provinsi baru namun mampu bersaing dengan provinsi yang sudah lebih lama terbentuk. Sementara IPM Lampung menempati posisi terendah di Pulau Sumatera, namun provinsi ini mengalami peningkatan status IPM dari kategori “sedang” menjadi “tinggi”. Sehingga pada tahun 2022, semua provinsi di regional Sumatera termasuk dalam kategori IPM “tinggi”. IPM Riau dan Sumatera Barat menjadi IPM tertinggi kedua dan ketiga setelah Kepulauan Riau.

### **Indeks Pembangunan Manusia Kepulauan Riau Terus Meningkat**

Pembangunan manusia Kepulauan Riau selama periode 2016-2022 semakin membaik. BPS mencatat angka IPM Kepulauan Riau tahun 2016 sebesar 73,99 dan terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Posisi terakhir angka IPM Kepulauan Riau tahun 2022 mencapai 76,46. Angka IPM yang terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu ini menandakan bahwa pembangunan manusia di Kepulauan Riau dari segi kesehatan, pendidikan dan ekonomi semakin membaik.

IPM sebagai tolak ukur pembangunan manusia dapat dijadikan acuan untuk melihat sejauh mana capaian pembangunan manusia di suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah lain. Kemajuan dalam pembangunan manusia memiliki dua perspektif. Pertama adalah pencapaian yang menggambarkan apa yang telah dicapai. Capaian yang lebih besar berarti menunjukkan adanya kemajuan yang lebih baik. Kedua adalah kecepatan perubahan pembangunan manusia. Kecepatan menunjukkan besarnya perubahan pembangunan yang berhasil dicapai dalam suatu rentang waktu tertentu.

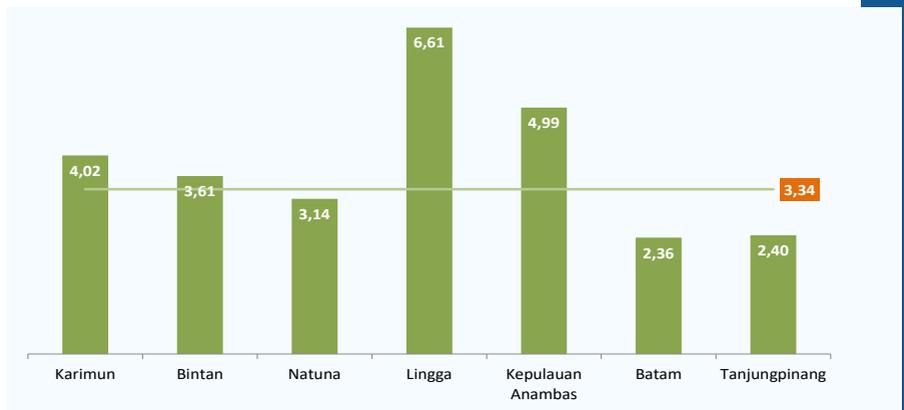
**Gambar 3.2 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Riau, 2016-2022**



Sumber : Badan Pusat Statistik

Dari Gambar 3.2. terlihat bahwa pertumbuhan IPM tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 0,88 persen, sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 0,15 persen. Pola perkembangan angka IPM kabupaten/kota di Kepulauan Riau secara umum sama dengan IPM Kepulauan Riau yang menunjukkan peningkatan setiap tahunnya.

**Gambar 3.3 Pertumbuhan IPM Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2016-2022**



Sumber : Badan Pusat Statistik

Dalam kurun waktu tahun 2016 sampai 2022, terdapat sebanyak 4 (empat) kabupaten yang pertumbuhan IPM nya diatas pertumbuhan IPM Provinsi Kepulauan Riau yaitu Kabupaten Lingga, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Karimun, dan Kabupaten Bintan. Sedangkan pertumbuhan IPM Kabupaten Natuna, Kota Tanjungpinang, dan Kota Batam dibawah pertumbuhan IPM Provinsi Kepri. Kabupaten yang mencapai pertumbuhan IPM tertinggi selama periode tersebut adalah Kabupaten Lingga yaitu sebesar 6,61 persen. Sementara pertumbuhan IPM paling lambat selama tujuh tahun terakhir adalah Kota Batam dengan pertumbuhan sebesar 2,36 persen.

Adapun rata-rata pertumbuhan IPM per tahun (2016-2022) mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah yaitu Kabupaten Lingga dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 1,19 persen, Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar 0,79 persen, Kabupaten Karimun sebesar 0,70 persen, Kabupaten Bintan sebesar 0,60 persen, Kabupaten Natuna sebesar 0,52 persen, Kota Batam sebesar 0,41 persen, dan Kota Tanjungpinang sebesar 0,38 persen.

Capaian IPM rendah bukan menjadi hambatan untuk meningkatkan pembangunan manusia. Terbukti bahwa wilayah dengan capaian pembangunan manusia yang masih rendah memiliki peluang untuk tumbuh lebih cepat dibanding wilayah dengan capaian yang sudah tinggi.

### 3.2 Capaian Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat Tumbuh

Kesehatan merupakan investasi penting bagi manusia. Hal tersebut tidak mengherankan mengingat manusia tidak dapat melakukan aktivitas dengan keadaan tubuh yang tidak sehat. Untuk itu, dewasa ini telah banyak berkembang ilmu kesehatan dalam hal mendukung manusia untuk tetap sehat sehingga peluang hidup lebih panjang semakin tinggi.

Dimensi umur panjang dan hidup sehat dapat diukur dengan harapan hidup saat lahir ( $e_0$ ). Harapan hidup saat lahir menunjukkan derajat kesehatan suatu wilayah. Umur harapan hidup saat lahir mengandung arti harapan hidup seorang bayi yang baru lahir. Semakin tinggi umur harapan hidup saat lahir maka dapat disimpulkan bahwa semakin baik pula derajat kesehatan masyarakat di wilayah tersebut.

Dalam periode 2016-2022, capaian dimensi umur panjang dan sehat Kepulauan Riau terus mengalami peningkatan. Selama periode tersebut, UHH saat lahir Kepulauan Riau tumbuh sebesar 0,22 persen setiap tahunnya. Meskipun terus meningkat, namun UHH saat lahir Kepulauan Riau masih berada di bawah angka nasional (rata-rata UHH seluruh provinsi di Indonesia).

Harapan hidup saat lahir Kepulauan Riau tahun 2022 mencapai 70,50, artinya bayi yang lahir hidup pada tahun 2022 di Kepulauan Riau mempunyai peluang untuk hidup hingga 70,50 tahun. Angka ini meningkat sebesar 0,38 tahun jika dibandingkan dengan tahun 2021. Capaian pada dimensi umur panjang dan hidup sehat Kepulauan Riau tahun 2022 mengalami percepatan daripada tahun sebelumnya, yaitu tumbuh sebesar 0,54 persen.

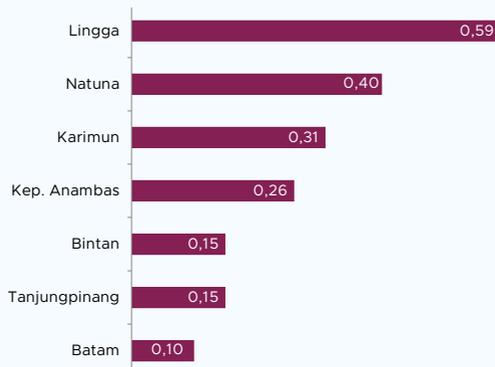
**Gambar 3.4 Perkembangan Umur Harapan Hidup saat Lahir Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional (Tahun), 2016-2022**



Sumber : Badan Pusat Statistik

Secara spasial, kondisi umur harapan hidup saat lahir kabupaten/kota di Kepulauan Riau tahun 2016-2022 juga mengalami peningkatan. Selama periode tersebut, pertumbuhan umur harapan hidup masing-masing kabupaten/kota bervariasi antara 0,73 persen sampai dengan 4,10 persen. Pertumbuhan umur harapan hidup tidak terlepas dari usaha pemerintah daerah dan elemen masyarakat dalam rangka menjamin kesehatan bersama.

**Gambar 3.5 Pertumbuhan per Tahun UHH saat Lahir Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2016-2022**



Sumber : Badan Pusat Statistik

Kabupaten Lingga dengan angka UHH terendah ternyata memiliki pertumbuhan UHH yang lebih cepat dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Lingga dalam mengejar ketertinggalan kesehatan membuahkan hasil yang cukup signifikan. Sementara itu, Kota Batam yang mempunyai nilai UHH tinggi, pertumbuhan UHH-nya lebih lambat.

### 3.3 Capaian Dimensi Pengetahuan

Pendidikan merupakan modal dasar bagi perkembangan suatu peradaban. Dengan pendidikan yang tinggi, maka peluang seseorang untuk mendapatkan kesehatan dan pekerjaan yang layak semakin terbuka lebar.

Dimensi pengetahuan dalam kaitannya dengan penghitungan IPM didekati dengan indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). RLS yang dicakup adalah rata-rata lamanya waktu yang digunakan oleh penduduk berumur 25 tahun ke atas untuk menjalani pendidikan formal, sedangkan HLS adalah jumlah tahun yang diharapkan akan dijalani individu berusia 7 tahun untuk menempuh pendidikan. Semakin tinggi angka RLS dan HLS maka pembangunan manusia dari sisi pengetahuan semakin baik pula.

Selama periode 2016-2022, rata-rata lama sekolah penduduk 25 tahun ke atas di Kepulauan Riau mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dengan rata-rata pertumbuhan per tahunnya sebesar 1,04 persen. Rata-rata lama sekolah di Kepulauan Riau

**Gambar 3.6** Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional (Tahun), 2016-2022

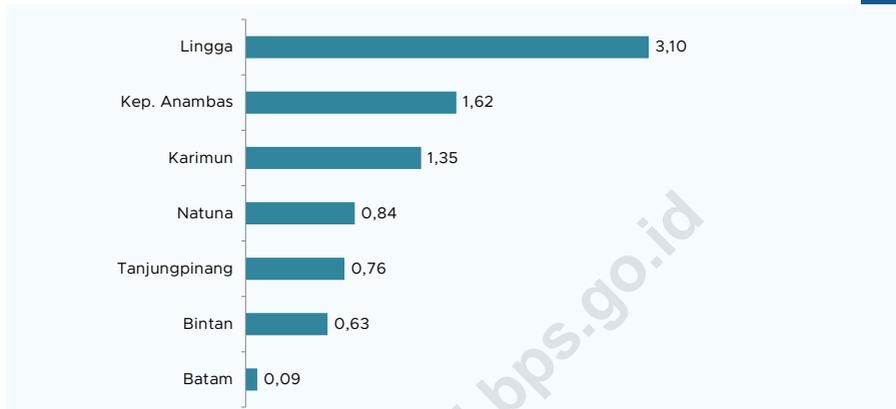


Sumber : Badan Pusat Statistik

tahun 2022 mencapai 10,37, artinya penduduk usia 25 tahun ke atas di Kepulauan Riau rata-rata telah menempuh pendidikan formal selama 10,37 tahun. Angka RLS Kepulauan Riau selalu berada di atas angka RLS nasional.

Secara umum, pertumbuhan rata-rata lama sekolah penduduk 25 tahun ke atas di kabupaten/kota memiliki pola yang sama dengan Provinsi Kepulauan Riau. Selama kurun waktu 2016-2022, rata-rata lama sekolah penduduk kabupaten/kota di Kepulauan Riau terus meningkat. Laju pertumbuhan tertinggi terjadi di Kabupaten Lingga, dimana selama tujuh tahun terakhir rata-rata lama sekolah penduduk 25 tahun ke atas tumbuh sebesar 21,71 persen atau 3,10 persen per tahunnya, sedangkan pertumbuhan terendah terjadi di Kota Batam sebesar 0,63 persen atau 0,09 persen per tahunnya. Melambatnya pertumbuhan rata-rata lama sekolah di Kota Batam karena tingkat pendidikan sebagian besar penduduk Kota Batam relatif sudah baik.

**Gambar 3.7** Pertumbuhan per Tahun Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2016-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik

Selain RLS, HLS juga menggambarkan tingkat pengetahuan. Harapan lama sekolah di Kepulauan Riau semakin meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2016-2022, harapan lama sekolah di Kepulauan Riau tumbuh sebesar 2,61 persen atau tumbuh 0,37 persen per tahunnya. Harapan lama sekolah di Kepulauan Riau tahun 2022 mencapai 12,99, artinya penduduk usia 7 tahun di Kepulauan Riau memiliki peluang untuk bersekolah hingga 12,99 tahun. Dibandingkan angka nasional, HLS Kepulauan Riau masih berada di bawah angka nasional.

**Gambar 3.8 Perkembangan Harapan Lama Sekolah Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional (Tahun), 2016-2022**



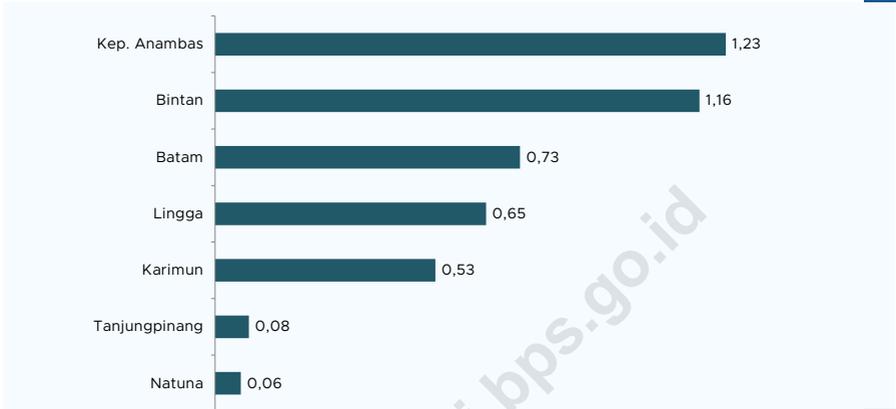
Sumber : Badan Pusat Statistik

Jika dilihat menurut kabupaten/kota, pertumbuhan per tahun HLS selama periode 2016-2022 berkisar antara 0,06 hingga 1,23 persen. Pertumbuhan HLS tertinggi terjadi di Kabupaten Kepulauan Anambas dengan pertumbuhan selama tujuh tahun terakhir mencapai 8,59 persen atau 1,23 persen per tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai harapan lama sekolah yang semakin membaik setiap tahunnya. Adapun pertumbuhan HLS terendah selama tujuh tahun terakhir terjadi di Kabupaten Natuna, dengan angka pertumbuhan sebesar 0,43 persen atau 0,06 per tahunnya.

### 3.4 Capaian Dimensi Standar Hidup Layak Mulai Meningkatkan

Dimensi terakhir pembentuk IPM adalah dimensi standar hidup layak yang diwakili oleh indikator pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Indikator ini menggambarkan kemampuan daya beli masyarakat selama periode tertentu. Perluasan pilihan penduduk dari sisi ekonomi dapat dilihat dari pendapatan penduduk yang didekati dengan pengeluarannya.

**Gambar 3.9** Pertumbuhan per Tahun Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2016-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik

Penduduk yang mempunyai pendapatan tinggi akan mempunyai pilihan yang lebih banyak dibandingkan dengan penduduk dengan pendapatan rendah atau penduduk miskin. Oleh karena itu IPM mengungkap pengeluaran per kapita disesuaikan sebagai salah satu indikator pembangunan manusia yang mewakili dimensi standar hidup layak.

Pengeluaran per kapita disesuaikan Kepulauan Riau selama periode 2016-2022 selalu berada di atas angka nasional. Pengeluaran per kapita disesuaikan tahun 2019 sebesar Rp 14,47 juta per tahun mengalami penurunan menjadi Rp 14,21 juta per tahun pada 2020, dan kembali turun menjadi Rp. 14,12 juta per tahun pada tahun 2021. Penurunan tersebut sebagai dampak Pandemi Covid-19. Namun, seiring dengan pemulihan perekonomian, pengeluaran per kapita mulai meningkat pada tahun 2022 menjadi Rp. 14,47 juta per tahun.

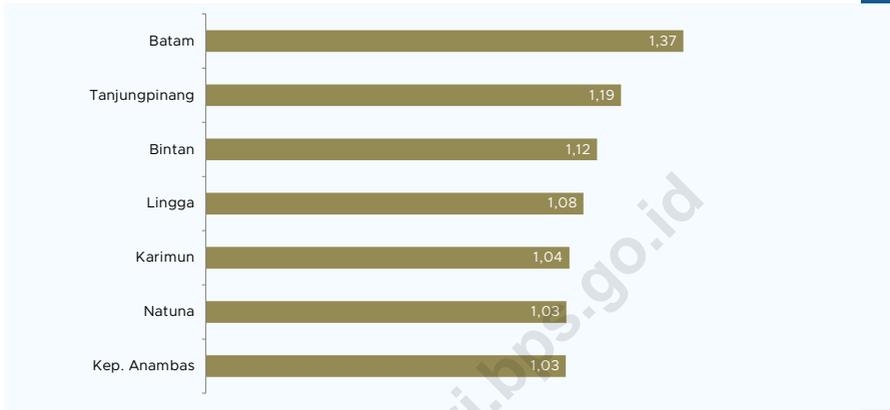
**Gambar 3.10 Perkembangan Pengeluaran per Kapita per Tahun yang D disesuaikan Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional (Juta Rupiah), 2016-2022**



Sumber : Badan Pusat Statistik

Pengeluaran per kapita di tingkat kabupaten/kota cukup variatif namun secara umum mempunyai pola yang sama dengan perkembangan pada tingkat provinsi. Selama kurun waktu 2016-2022, Kota Batam mengalami peningkatan pengeluaran per kapita tertinggi di Kepulauan Riau, mencapai 9,57 persen atau tumbuh sebesar 1,37 persen tiap tahunnya. Sedangkan Kabupaten Kepulauan Anambas menjadi kabupaten dengan pertumbuhan pengeluaran per kapita terendah selama tujuh tahun terakhir, yaitu sebesar 7,22 persen atau meningkat 1,03 persen per tahunnya.

**Gambar 3.11** Pertumbuhan per Tahun Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2016-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik

<https://kepri.bps.go.id>

# 4



## CAPAIAN PEMBANGUNAN MANUSIA DI KABUPATEN/KOTA



Capaian IPM tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu Kota Batam dan IPM terendah yaitu Kabupaten Lingga.





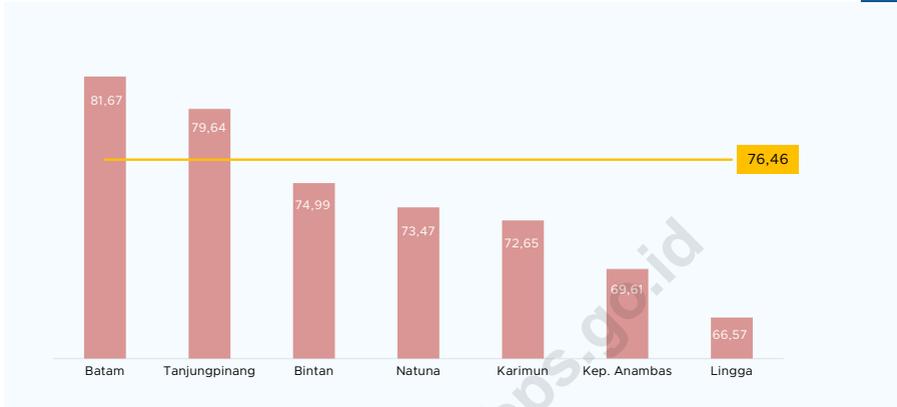
# Capaian Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota

## 4.1 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau

Indeks Pembangunan Manusia Kepulauan Riau tahun 2022 mencapai 76,46 dan telah berstatus “tinggi”, sedangkan capaian IPM di tingkat kabupaten/kota bervariasi. Variasi tersebut tentunya disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya faktor sumber daya (alam dan manusia) dan kebijakan pemerintah daerah yang berbeda-beda. Capaian pembangunan manusia yang tercermin dari angka IPM perlu terus ditingkatkan dan dievaluasi agar pembangunan manusia dapat terlaksana dengan baik dan merata.

Capaian IPM kabupaten/kota tertinggi di Kepulauan Riau pada tahun 2022 adalah Kota Batam dengan angka IPM mencapai 81,67 atau berstatus “sangat tinggi”. Sementara itu, capaian IPM terendah yaitu Kabupaten Lingga dengan angka IPM sebesar 66,57 atau berstatus “sedang”. Adapun kabupaten/kota lain yaitu Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Karimun berstatus IPM “tinggi”, sedangkan Kabupaten Kepulauan Anambas berstatus “sedang”.

**Gambar 4.1** Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2022



Sumber : Badan Pusat Statistik

Posisi pembangunan manusia antar kabupaten/kota ditunjukkan oleh Gambar 3.1. Pembangunan manusia Kota Batam dan Kota Tanjungpinang lebih baik dari Provinsi Kepulauan Riau secara umum. Hal tersebut ditunjukkan dengan angka IPM kedua kota tersebut yang berada di atas angka IPM Provinsi Kepulauan Riau. Sebaliknya, lima kabupaten lainnya memiliki angka IPM di bawah angka provinsi yaitu Kabupaten Bintan dengan angka IPM 74,99; Kabupaten Natuna dengan angka IPM 73,47; Kabupaten Karimun dengan angka IPM 72,65; serta Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Lingga masing-masing dengan angka IPM 69,61 dan 66,57.

Pencapaian pembangunan manusia yang tercermin melalui IPM bukan semata-mata hanya diukur dari tingginya capaian IPM saja, namun juga perlu dikaji lebih dalam lagi sejauh mana kecepatan pembangunan manusia pada suatu periode tertentu.

Proses pencapaian pembangunan manusia inilah yang menjadi poin penting karena secara filosofi untuk mencapai suatu ranking atau posisi yang baik diperlukan effort lebih. Kecepatan pertumbuhan IPM merupakan salah satu indikator yang perlu dipertimbangkan dalam mengukur keberhasilan pembangunan manusia.

### **Batam dengan Angka IPM Tertinggi di Kepulauan Riau**

Sebagai kota terbesar di Kepulauan Riau, Batam dihuni oleh penduduk yang berasal dari berbagai suku, bangsa, agama, dan ras. Secara ekonomi, Batam merupakan pusat industri di wilayah Semenanjung Malaka yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Hal inilah yang menjadi daya tarik Batam, penduduk dari berbagai wilayah di Indonesia bahkan dari luar negeri berbondong-bondong ke Batam untuk mencari penghidupan yang lebih layak. Tidaklah mengherankan jika sebutan kota metropolitan layak disandingkan oleh Batam. Selain itu, Batam juga menjadi penopang utama perekonomian Kepulauan Riau karena lebih dari separuh perekonomian Kepulauan Riau bersumber dari Batam.

Indeks Pembangunan Manusia Batam tahun 2022 mencapai 81,67 dan berstatus “sangat tinggi”. Tingginya IPM Batam didorong oleh dimensi umur panjang dan hidup sehat masyarakat Batam yang sudah sangat baik. Dimensi umur panjang dan hidup sehat yang didekati oleh indikator UHH, dimana UHH Batam mencapai 73,62 Artinya penduduk Batam yang baru lahir pada tahun 2022 berpeluang untuk hidup sampai dengan 73 tahun

mendatang. Faktor pendorong tingginya IPM Batam yang kedua adalah dimensi pengetahuan, dimana rata-rata lama sekolah penduduk Batam mencapai 11,17 tahun dan angka harapan lama sekolah mencapai 13,32 tahun. Sebagian besar penduduk Batam telah sadar akan pentingnya tingkat pendidikan dan pemerintah daerah memberikan fasilitas pendidikan yang layak. Demikian halnya dengan dimensi standar hidup layak yang mengalami pertumbuhan positif. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan Batam meningkat dari Rp. 18,03 juta per tahun pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp. 18,51 juta per tahun pada tahun 2022. Capaian IPM Batam yang sudah baik dan harus dipertahankan agar pembangunan manusia tercapai secara merata di seluruh bidang kehidupan.

### **Lingga sebagai Kabupaten dengan Angka IPM Terendah di Kepulauan Riau**

Secara singkat, Kabupaten Lingga merupakan asal-usul kerajaan melayu yang ada di Johor-Pahang-Riau-Lingga. Sejarah melayu sangat kental terasa di Kabupaten Lingga. Pusat kerajaan berada di Kota Daik, maka tidak heran jika Kabupaten Lingga dijuluki Bunda Tanah Melayu. Secara geografis, Kabupaten Lingga berbatasan dengan Kota Batam dan Laut Natuna Utara di sebelah utaranya, kemudian sebelah selatan dengan Laut Bangka dan Selat Berhala, sebelah barat dengan Laut Indragiri Hilir, Riau dan sebelah timur dengan Laut Natuna Utara. Kabupaten Lingga memiliki 13 kecamatan dengan luas total 2.216,04 km<sup>2</sup>. Kabupaten Lingga terdiri dari dua pulau besar yaitu Pulau Singkep dan Pulau Lingga.

Pemerintah Kabupaten Lingga terus melakukan berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan IPM daerah Lingga. Meskipun IPM Kabupaten Lingga hingga saat ini masih menjadi yang terendah, namun percepatan pertumbuhan IPM Kabupaten Lingga cukup tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Kepulauan Riau.

Selama tujuh tahun terakhir, angka IPM Lingga mampu tumbuh sebesar 6,61 persen atau meningkat 0,94 persen per tahunnya. Bahkan sejak tahun 2013, pertumbuhan IPM Kabupaten Lingga adalah yang tercepat di Kepulauan Riau, kecuali pada tahun 2020 dan 2022 dimana pertumbuhan IPM yang tercepat adalah Kabupaten Karimun.

IPM Kabupaten Lingga tahun 2022 mencapai 66,57 atau berstatus IPM “sedang”. Umur harapan hidup saat lahir yang mewakili dimensi umur panjang dan hidup sehat mencapai 62,92, yang berarti bahwa bayi yang baru lahir pada tahun 2022 di Kabupaten Lingga memiliki peluang untuk hidup hingga 62,92 tahun. Sementara itu, pada dimensi pengetahuan yang diwakili oleh indikator rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah masing-masing mencapai 7,12 dan 12,61. Rata-rata lama sekolah sebesar 7,12 diartikan bahwa penduduk Lingga yang berumur 25 tahun ke atas rata-rata telah menempuh pendidikan formal selama 7,12 tahun, sedangkan angka harapan lama sekolah sebesar 12,61 diartikan bahwa rata-rata anak berusia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,61 tahun. Dari dimensi standar hidup layak, indikator pengeluaran per kapita Kabupaten Lingga mencapai 12,134 juta rupiah per tahun. Jika dibandingkan dengan kabupaten/

kota lain di Kepulauan Riau, pengeluaran per kapita Kabupaten Lingga adalah yang terendah.

### **Karimun merupakan Kabupaten dengan Pertumbuhan IPM Tercepat di Kepulauan Riau**

Kabupaten Karimun merupakan sebuah kabupaten kepulauan yang terdiri dari 256 buah pulau, dimana semua pulau sudah bernama dan hanya 57 pulau yang sudah berpenghuni. Dua pulau terbesar yang menjadi pusat pemukiman dan sentra ekonomi adalah Pulau Karimun dan Kundur.

Posisi strategis Kabupaten Karimun yang diapit oleh tiga negara, berimbas pada pesatnya perkembangan kabupaten ini. Status Free Trade Zone (FTZ) yang disandang Karimun cukup berpengaruh terutama terhadap kegiatan perekonomian.

Pertumbuhan IPM Kabupaten Karimun pada tahun 2022 adalah yang tercepat di Kepulauan Riau, yaitu sebesar 1,32 persen. Angka IPM Karimun mencapai 72,65 atau berstatus “tinggi”. Pada tahun 2022, pencapaian dimensi umur panjang dan hidup sehat dan pengetahuan, yaitu dari umur harapan hidup saat lahir penduduk Karimun sebesar 71,53 tahun. Sementara itu, dimensi pengetahuan yang diwakili indikator rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah masing-masing mencapai 8,48 tahun dan 12,59 tahun. Rata-rata lama sekolah sebesar 8,48 tahun dapat diartikan bahwa penduduk Karimun yang berumur 25 tahun ke atas rata-rata telah menempuh pendidikan formal selama 8,48 tahun. Sementara itu, angka harapan lama sekolah mencapai 12,59 tahun yang berarti bahwa penduduk berumur 7 tahun di Karimun memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,59 tahun. Sementara dari dimensi standar hidup layak,

Karimun mengalami pertumbuhan tertinggi jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan Karimun meningkat sebesar 3,58 persen yaitu dari Rp. 11,88 juta per tahun pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp. 12,31 juta per tahun pada tahun 2022.

### **Harapan Lama Sekolah di Tanjungpinang Tertinggi se-Kepulauan Riau**

Kota Tanjungpinang merupakan ibu kota Provinsi Kepulauan Riau. Sebagai pusat pemerintahan, Tanjungpinang memiliki fasilitas publik yang cukup memadai. Fasilitas publik tersebut digunakan sebagai alat untuk mendukung program pemerintah dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat. Mencapai kesejahteraan masyarakat erat kaitannya dengan pembangunan manusia secara menyeluruh. Pembangunan manusia di Tanjungpinang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari program kerja pemerintah daerah di samping peningkatan ekonominya.

Angka IPM Tanjungpinang tahun 2022 mencapai 79,64 atau berstatus “tinggi”. Tingginya pembangunan manusia di Tanjungpinang didorong oleh tingginya pencapaian dimensi umur panjang dan hidup sehat dan pengetahuan. Angka harapan hidup saat lahir penduduk Tanjungpinang sebesar 72,49 tahun. Sementara itu, dimensi pengetahuan yang diwakili indikator rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah masing-masing mencapai 10,49 tahun dan 14,14 tahun. Rata-rata lama sekolah sebesar 10,49 tahun dapat diartikan bahwa penduduk Tanjungpinang yang berumur 25 tahun ke atas rata-rata telah menempuh pendidikan formal selama 10,49

tahun. Sementara itu, angka harapan lama sekolah mencapai 14,14 tahun yang berarti bahwa penduduk berumur 7 tahun di Tanjungpinang memiliki peluang untuk bersekolah selama 14,14 tahun. Angka harapan lama sekolah di Tanjungpinang sebesar 14,14 merupakan yang tertinggi di seluruh kabupaten/kota di Kepulauan Riau. Hal ini mengandung arti bahwa kondisi pembangunan sistem pendidikan di Tanjungpinang lebih layak dan memadai. Pembentuk angka IPM lainnya yakni pengeluaran per kapita yang disesuaikan di Tanjungpinang tahun 2022 mencapai 15,864 juta rupiah per tahun. Mengalami percepatan pertumbuhan sebesar 2,75 persen jika dibandingkan tahun 2021.

### **Pertumbuhan IPM di Bintan sebesar 0,56 persen**

Kabupaten Bintan merupakan bagian dari paparan kontinental yang terkenal dengan nama “Paparasi Sunda”, wilayahnya membentang dari Semenanjung Malaysia bagian utara sampai Pulau Bangka dan Belitung di bagian selatan. Bandar Seri Bintan merupakan ibukota Kabupaten Bintan.

Pada tahun 2022, pertumbuhan IPM Kabupaten Bintan sebesar 0,56 persen. Yaitu dari 74,57 pada tahun 2021 menjadi 74,99 pada tahun 2022. IPM Kabupaten Bintan berstatus IPM “tinggi”. Umur harapan hidup saat lahir yang mewakili dimensi umur panjang dan hidup sehat mencapai 70,76, yang berarti bahwa bayi yang baru lahir pada tahun 2022 di Kabupaten Bintan memiliki peluang untuk hidup hingga 70,76 tahun. Sementara itu, pada dimensi pengetahuan yang diwakili oleh indikator rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah masing-masing mencapai 8,70 dan 13,27. Rata-rata lama sekolah

sebesar 8,70 diartikan bahwa penduduk Bintan yang berumur 25 tahun ke atas rata-rata telah menempuh pendidikan formal selama 8,70 tahun, sedangkan angka harapan lama sekolah sebesar 13,27 diartikan bahwa rata-rata anak berusia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,27 tahun. Dari dimensi standar hidup layak, indikator pengeluaran per kapita Kabupaten Bintan mencapai 14,739 juta rupiah per tahun.

### Capaian IPM Kabupaten Natuna

Kabupaten Natuna terdapat sebanyak 159 pulau, dengan luas wilayah daratan 1.978,29 km<sup>2</sup>. Ibukota Kabupaten Natuna adalah Kota Ranai.

IPM Kabupaten Natuna pada tahun 2022 adalah 73,47 sehingga mempunyai status IPM “tinggi”. Umur harapan hidup saat lahir yang mewakili dimensi umur panjang dan hidup sehat mencapai 65,76, yang berarti bahwa bayi yang baru lahir pada tahun 2022 di Kabupaten Natuna memiliki peluang untuk hidup hingga 65,76 tahun. Sementara itu, pada dimensi pengetahuan yang diwakili oleh indikator rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah masing-masing mencapai 8,96 dan 13,92. Rata-rata lama sekolah sebesar 8,96 diartikan bahwa penduduk Natuna yang berumur 25 tahun ke atas rata-rata telah menempuh pendidikan formal selama 8,96 tahun, sedangkan angka harapan lama sekolah sebesar 13,92 diartikan bahwa rata-rata anak berusia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,92 tahun. Dari dimensi standar hidup layak, indikator pengeluaran per kapita Kabupaten Natuna mencapai 14,834 juta rupiah per tahun.

## IPM Kabupaten Anambas masih berstatus sedang

Kabupaten Anambas terdiri dari gugusan pulau besar dan kecil yang tersebar di seluruh wilayah, dimana beberapa pulau tersebut berbatasan langsung dengan perairan Negara lain atau lautan internasional. Gugusan Kabupaten Kepulauan Anambas pernah menjadi pusat kawedanan pada masa pemerintahan kolonial Belanda yang berpusat di Tarempa.

IPM Kabupaten Anambas pada tahun 2022 adalah 69,61 sehingga masih berstatus IPM “tinggi”, dengan pertumbuhan IPM sebesar 0,55 persen. Umur harapan hidup saat lahir yang mewakili dimensi umur panjang dan hidup sehat mencapai 67,73, yang berarti bahwa bayi yang baru lahir pada tahun 2022 di Kabupaten Anambas memiliki peluang untuk hidup hingga 67,73 tahun. Sementara itu, pada dimensi pengetahuan yang diwakili oleh indikator rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah masing-masing mencapai 7,38 dan 12,89 Rata-rata lama sekolah sebesar 7,38 diartikan bahwa penduduk Anambas yang berumur 25 tahun ke atas rata-rata telah menempuh pendidikan formal selama 7,38 tahun, sedangkan angka harapan lama sekolah sebesar 12,89 diartikan bahwa rata-rata anak berusia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,89 tahun. Dari dimensi standar hidup layak, indikator pengeluaran per kapita Kabupaten Anambas mencapai 12,137 juta rupiah per tahun, dimana nilainya paling rendah kedua setelah Kabupaten Lingga.

5



# PROFIL PEMBANGUNAN MANUSIA DI KABUPATEN/KOTA

<https://kepri.bps.go.id>





Tabel 5.1 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Kabupaten Karimun, 2022

Indikator	Capaian	Rata-rata Pertumbuhan* 2010-2022 (%)
(1)	(2)	(3)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	71,53 tahun	0,40
Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,59 tahun	0,67
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8,48 tahun	1,78
Pengeluaran riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan	Rp. 12.304 ribu	1,38

Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 5.1 Perkembangan IPM Kabupaten Karimun, 2010-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 5.2 Pertumbuhan IPM Kabupaten Karimun 2011-2022 (persen)



Sumber : Badan Pusat Statistik

**Tabel 5.2 Beberapa Indikator Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Kabupaten Karimun, 2021-2022**

Indikator	Satuan	2021	2022	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat</b>				
Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih	%	79,87	90,94	0,40
Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Layak	%	88,10	85,19	0,67
Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar	%	0,00	0,07	0,07
Morbiditas	%	10,08	9,91	0,17
Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas dengan Umur Perkawinan Pertama < 19 Tahun	%	1,78	1,78	1,78
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15-49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan	%	97,93	100	2,07
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15-49 Tahun yang Proses Kelahiran Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih	%	100	100	0,00
<b>Dimensi Pengetahuan</b>				
Angka Partisipasi Sekolah 7-12 Tahun	%	99,61	99,33	-0,28
Angka Partisipasi Sekolah 13-15 Tahun	%	98,55	97,54	-1,01
Angka Partisipasi Sekolah 16-18 Tahun	%	77,91	77,10	-0,81
<b>Dimensi Standar Hidup Layak</b>				
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	miliar rp	14.195,74	15.554,50	1.358,76
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010	miliar rp	9.332,77	9.741,85	409,08
Jumlah Penduduk Bekerja	orang	100.615	101.543	928
Persentase Pekerja Formal	%	56,87	55,05	-1,82
Persentase Pekerja Informal	%	43,13	44,95	1,82
Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai per Bulan	rp	3.171.610	3.538.914	367.304
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,20	6,87	-0,33
Penduduk Miskin	ribu jiwa	16,28	16,44	0,16
Persentase Penduduk Miskin	%	6,85	6,87	0,02
Gini Rasio	-	0,31	0,288	-0,02

Sumber : Badan Pusat Statistik

**Tabel 5.3** Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Kabupaten Bintan, 2022

Indikator	Capaian	Rata-rata Pertumbuhan* 2010-2022 (%)
(1)	(2)	(3)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	70,76 tahun	0,16
Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,27 tahun	1,52
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8,70 tahun	0,62
Pengeluaran riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan	Rp. 14.739 ribu	1,17

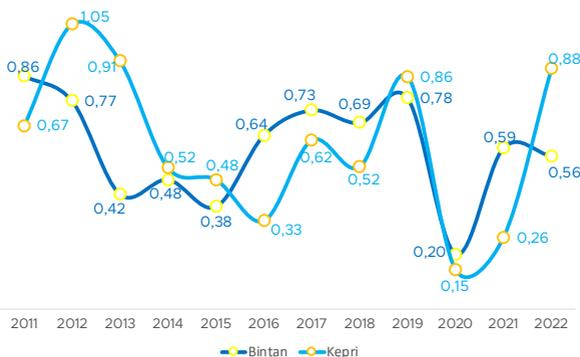
Sumber : Badan Pusat Statistik

**Gambar 5.3** Perkembangan IPM Kabupaten Bintan, 2010-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik

**Gambar 5.4** Pertumbuhan IPM Kabupaten Bintan, 2011-2022 (persen)



Sumber : Badan Pusat Statistik

**Tabel 5.4 Beberapa Indikator Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Kabupaten Bintan, 2021-2022**

Indikator	Satuan	2021	2022	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat</b>				
Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih	%	71,20	73,57	2,37
Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Layak	%	76,64	85,48	8,84
Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar	%	0,55	0,20	-0,35
Morbiditas	%	3,44	14,25	10,81
Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas dengan Umur Perkawinan Pertama < 19 Tahun	%	21,11	18,91	-2,20
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15-49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan	%	99,08	96,64	-2,44
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15-49 Tahun yang Proses Kelahiran Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih	%	100,00	100,00	0,00
<b>Dimensi Pengetahuan</b>				
Angka Partisipasi Sekolah 7-12 Tahun	%	99,46	99,98	0,52
Angka Partisipasi Sekolah 13-15 Tahun	%	98,37	99,60	1,23
Angka Partisipasi Sekolah 16-18 Tahun	%	90,49	92,70	2,21
<b>Dimensi Standar Hidup Layak</b>				
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	miliar rp	21.251,13	22.995,78	1.744,65
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010	miliar rp	13.933,49	14.551,76	618,27
Jumlah Penduduk Bekerja	orang	70.748	76.483	5.735
Persentase Pekerja Formal	%	62,17	61,05	-1,12
Persentase Pekerja Informal	%	37,83	38,95	1,12
Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai per Bulan	rp	3.227.941	3.444.703	216.762
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,62	6,91	-1,71
Penduduk Miskin	ribu jiwa	10,54	10,67	0,13
Persentase Penduduk Miskin	%	6,42	6,44	0,02
Gini Rasio	-	0,27	0,288	0,02

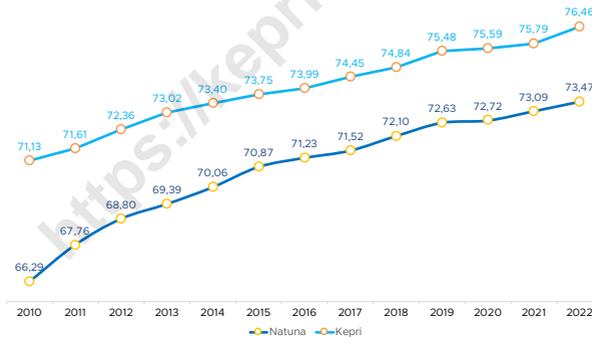
Sumber : Badan Pusat Statistik

Tabel 5.5 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Kabupaten Natuna, 2022

Indikator	Capaian	Rata-rata Pertumbuhan* 2010-2022 (%)
(1)	(2)	(3)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	65,76 tahun	0,50
Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,92 tahun	1,03
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8,96 tahun	2,02
Pengeluaran riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan	Rp. 14.834 ribu	1,14

Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 5.5 Perkembangan IPM Kabupaten Natuna, 2010-2022



Gambar 5.6 Pertumbuhan IPM Kabupaten Natuna, 2011-2022 (persen)



**Tabel 5.6 Beberapa Indikator Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Kabupaten Natuna, 2021-2022**

Indikator	Satuan	2021	2022	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat</b>				
Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih	%	81,34	85,78	4,44
Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Layak	%	81,26	87,23	5,97
Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar	%	4,90	2,53	-2,37
Angka Kesakitan	%	5,24	24,10	18,86
Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas dengan Umur Perkawinan Pertama < 19 Tahun	%	35,77	33,92	-1,85
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15-49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan	%	75,57	72,64	-2,93
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15-49 Tahun yang Proses Kelahiran Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih	%	95,53	87,10	-8,43
<b>Dimensi Pengetahuan</b>				
Angka Partisipasi Sekolah 7-12 Tahun	%	99,33	99,34	0,01
Angka Partisipasi Sekolah 13-15 Tahun	%	99,13	99,43	0,30
Angka Partisipasi Sekolah 16-18 Tahun	%	77,55	75,60	-1,95
<b>Dimensi Standar Hidup Layak</b>				
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	miliar rp	20.870,16	24.265,43	3.395,27
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010	miliar rp	14.645,40	14.661,78	16,38
Jumlah Penduduk Bekerja	orang	40.343	38.927	-1.416
Persentase Pekerja Formal	%	45,26	46,55	1,29
Persentase Pekerja Informal	%	54,74	53,45	-1,29
Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai per Bulan	rp	2.795.102	2.780.699	-14.403
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,15	4,15	-1,00
Penduduk Miskin	ribu jiwa	3,98	4,32	0,34
Persentase Penduduk Miskin	%	4,95	5,32	0,37
Gini Rasio	-	0,30	0,291	-0,01

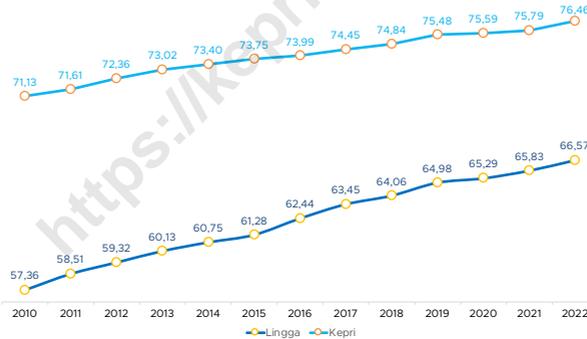
Sumber : Badan Pusat Statistik

Tabel 5.7 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Kabupaten Lingga, 2022

Indikator	Capaian	Rata-rata Pertumbuhan* 2010-2022 (%)
(1)	(2)	(3)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	62,92 tahun	0,90
Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,61 tahun	1,36
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7,12 tahun	2,60
Pengeluaran riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan	Rp. 12.134 ribu	1,37

Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 5.7 Perkembangan IPM Kabupaten Lingga, 2010-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 5.8 Pertumbuhan IPM Kabupaten Lingga, 2011-2022 (persen)



Sumber : Badan Pusat Statistik

**Tabel 5.8 Beberapa Indikator Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Kabupaten Lingga, 2021-2022**

Indikator	Satuan	2021	2022	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat</b>				
Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih	%	79,07	79,97	0,90
Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Layak	%	81,25	83,48	2,23
Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar	%	5,21	7,61	2,40
Morbiditas	%	8,98	24,80	15,82
Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas dengan Umur Perkawinan Pertama < 19 Tahun	%	27,92	24,73	-3,19
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15-49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan	%	83,94	76,16	-7,78
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15-49 Tahun yang Proses Kelahiran Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih	%	100,00	99,15	-0,85
<b>Dimensi Pengetahuan</b>				
Angka Partisipasi Sekolah 7-12 Tahun	%	99,43	98,63	-0,80
Angka Partisipasi Sekolah 13-15 Tahun	%	99,29	94,33	-4,96
Angka Partisipasi Sekolah 16-18 Tahun	%	79,17	80,31	1,14
<b>Dimensi Standar Hidup Layak</b>				
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	miliar rp	4.499,27	4.852,61	353,34
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010	miliar rp	2.971,55	3.082,79	111,24
Jumlah Penduduk Bekerja	orang	42.884	44.103	1.219
Persentase Pekerja Formal	%	46,51	42,63	-3,88
Persentase Pekerja Informal	%	53,49	57,37	3,88
Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai per Bulan	rp	2.455.630	2.754.632	299.002
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,23	3,09	-1,14
Penduduk Miskin	ribu jiwa	12,58	12,70	0,12
Persentase Penduduk Miskin	%	13,93	14,05	0,12
Gini Rasio	-	0,29	0,277	-0,01

Sumber : Badan Pusat Statistik

Tabel 5.9 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Kabupaten Kep. Anambas, 2022

Indikator	Capaian	Rata-rata Pertumbuhan* 2010-2022 (%)
(1)	(2)	(3)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	67,73 tahun	0,31
Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,89 tahun	1,22
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7,38 tahun	1,62
Pengeluaran riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan	Rp. 12.137 ribu	1,65

Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 5.9 Perkembangan IPM Kabupaten Kep. Anambas, 2010-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 5.10 Pertumbuhan IPM Kabupaten Kep. Anambas, 2011-2022 (persen)



Sumber : Badan Pusat Statistik

**Tabel 5.10 Beberapa Indikator Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Kabupaten Kep. Anambas, 2021-2022**

Indikator	Satuan	2021	2022	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat</b>				
Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih	%	63,95	61,31	-2,64
Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Layak	%	20,51	28,56	8,05
Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar	%	0,77	2,04	1,27
Morbiditas	%	4,84	8,68	3,84
Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas dengan Umur Perkawinan Pertama < 19 Tahun	%	33,55	29,92	-3,63
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15-49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan	%	84,20	78,07	-6,13
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15-49 Tahun yang Proses Kelahiran Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih	%	96,67	97,67	1,00
<b>Dimensi Pengetahuan</b>				
Angka Partisipasi Sekolah 7-12 Tahun	%	99,16	99,39	0,23
Angka Partisipasi Sekolah 13-15 Tahun	%	97,91	97,69	-0,22
Angka Partisipasi Sekolah 16-18 Tahun	%	88,98	88,25	-0,73
<b>Dimensi Standar Hidup Layak</b>				
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	miliar rp	16.697,53	19.909,09	3.211,56
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010	miliar rp	11.108,49	11.118,23	9,75
Jumlah Penduduk Bekerja	orang	22.128	22.704	576
Persentase Pekerja Formal	%	44,44	44,14	-0,30
Persentase Pekerja Informal	%	55,56	55,86	0,30
Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai per Bulan	rp	3.518.849	3.892.824	373.975
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	1,27	2,15	0,88
Penduduk Miskin	ribu jiwa	3,08	3,29	0,21
Persentase Penduduk Miskin	%	7,09	7,51	0,42
Gini Rasio	-	0,30	0,313	0,01

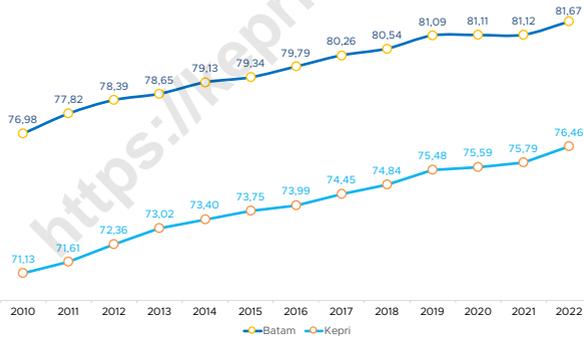
Sumber : Badan Pusat Statistik

**Tabel 5.11 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM 2022**

Indikator	Capaian	Rata-rata Pertumbuhan* 2010-2022 (%)
(1)	(2)	(3)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	73,62 tahun	0,12
Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,32 tahun	1,34
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	11,17 tahun	0,50
Pengeluaran riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan	Rp. 18.506 ribu	1,19

Sumber : Badan Pusat Statistik

**Gambar 5.11 Perkembangan IPM Kota Batam, 2010-2022**



**Gambar 5.12 Pertumbuhan IPM Kota Batam, 2011-2022 (persen)**



**Tabel 5.12 Beberapa Indikator Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Kota Batam, 2021-2022**

Indikator	Satuan	2021	2022	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat</b>				
Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih	%	98,81	98,32	-0,49
Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Layak	%	95,63	95,34	-0,29
Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar	%	0,51	0,64	0,13
Morbiditas	%	4,45	5,93	1,48
Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas dengan Umur Perkawinan Pertama < 19 Tahun	%	10,99	11,03	0,04
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15-49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan	%	97,05	98,23	1,18
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15-49 Tahun yang Proses Kelahiran Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih	%	98,83	98,23	-0,60
<b>Dimensi Pengetahuan</b>				
Angka Partisipasi Sekolah 7-12 Tahun	%	99,68	99,21	-0,47
Angka Partisipasi Sekolah 13-15 Tahun	%	98,95	99,30	0,35
Angka Partisipasi Sekolah 16-18 Tahun	%	84,45	85,12	0,67
<b>Dimensi Standar Hidup Layak</b>				
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	miliar rp	172.843,90	194.836,26	21.992,35
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010	miliar rp	111.068,95	118.665,21	7.596,25
Jumlah Penduduk Bekerja	orang	716.193	767.507	51.314
Persentase Pekerja Formal	%	69,37	67,72	-1,65
Persentase Pekerja Informal	%	30,63	32,28	1,65
Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai per Bulan	rp	4.393.363	4.511.574	118.211
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	11,64	9,56	-2,08
Penduduk Miskin	ribu jiwa	77,17	82,59	5,42
Persentase Penduduk Miskin	%	5,05	5,19	0,14
Gini Rasio	-	0,33	0,336	0,00

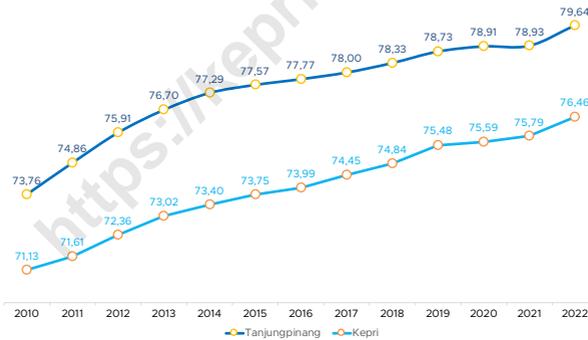
Sumber : Badan Pusat Statistik

Tabel 5.13 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Kota Tanjungpinang, 2022

Indikator	Capaian	Rata-rata Pertumbuhan* 2010-2022 (%)
(1)	(2)	(3)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	72,49 tahun	0,15
Harapan Lama Sekolah (HLS)	14,14 tahun	1,15
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	10,49 tahun	1,16
Pengeluaran riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan	Rp. 15.864 ribu	1,53

Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 5.13 Perkembangan IPM Kota Tanjungpinang, 2010-2022



Gambar 5.14 Pertumbuhan IPM Kota Tanjungpinang, 2011-2022 (persen)



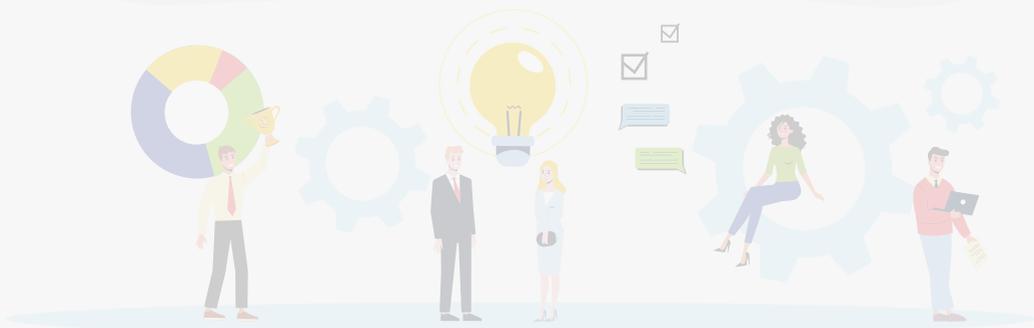
**Tabel 5.14 Beberapa Indikator Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Kota Tanjungpinang, 2021-2022**

Indikator	Satuan	2021	2022	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat</b>				
Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih	%	87,39	77,71	-9,68
Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Layak	%	91,66	93,35	1,69
Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar	%	0,51	0,64	0,13
Morbiditas	%	3,38	5,20	1,82
Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas dengan Umur Perkawinan Pertama < 19 Tahun	%	15,95	15,27	-0,68
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15-49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan	%	96,13	99,53	3,40
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15-49 Tahun yang Proses Kelahirannya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih	%	98,16	100,00	1,84
<b>Dimensi Pengetahuan</b>				
Angka Partisipasi Sekolah 7-12 Tahun	%	99,55	99,49	-0,06
Angka Partisipasi Sekolah 13-15 Tahun	%	98,88	99,50	0,62
Angka Partisipasi Sekolah 16-18 Tahun	%	91,06	87,16	-3,90
<b>Dimensi Standar Hidup Layak</b>				
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	miliar rp	20.099,37	21.792,47	1.693,10
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010	miliar rp	14.020,21	14.597,57	577,36
Jumlah Penduduk Bekerja	orang	94.508	104.730	10.222
Persentase Pekerja Formal	%	61,91	63,86	1,95
Persentase Pekerja Informal	%	38,09	36,14	-1,95
Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai per Bulan	rp	3.606.542	3.111.119	-495.423
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,31	5,27	-1,04
Penduduk Miskin	ribu jiwa	20,85	21,67	0,82
Persentase Penduduk Miskin	%	9,57	9,85	0,28
Gini Rasio	-	0,35	0,35	-

Sumber : Badan Pusat Statistik



# LAMPIRAN





# Lampiran

## Lampiran 1 *Sampling Error* Beberapa Indikator, 2022

Kabupaten/Kota	Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (%)	Selang Kepercayaan 95%	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Angka Kesakitan</b>					
Karimun	9,91	1,15	11,57	7,66	12,16
Bintan	14,25	1,76	12,36	10,80	17,71
Natuna	24,10	2,89	12,00	18,43	29,77
Lingga	24,80	2,13	8,58	20,63	28,98
Kep. Anambas	8,68	1,69	19,42	5,38	11,99
Batam	5,93	0,60	10,20	4,74	7,11
Tanjungpinang	5,20	0,88	16,93	3,48	6,93
Kepulauan Riau	8,18	0,46	5,66	7,27	9,09
<b>Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih</b>					
Karimun	90,94	1,34	1,47	88,31	93,57
Bintan	73,57	2,35	3,19	68,97	78,18
Natuna	85,78	1,89	2,20	82,08	89,48
Lingga	79,97	2,04	2,55	75,98	83,97
Kep. Anambas	61,31	2,90	4,72	55,63	66,98
Batam	98,32	0,45	0,46	97,43	99,20
Tanjungpinang	77,71	2,11	2,72	73,57	81,85
Kepulauan Riau	92,67	0,45	0,48	91,80	93,55
<b>Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Layak</b>					
Karimun	85,19	1,66	1,95	81,93	88,44
Bintan	85,48	2,05	2,40	81,46	89,49
Natuna	87,23	1,81	2,08	83,68	90,78
Lingga	83,48	1,94	2,32	79,68	87,28
Kep. Anambas	28,56	2,95	10,32	22,78	34,34

Kabupaten/Kota	Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (%)	Selang Kepercayaan 95%	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Batam	95,34	0,73	0,76	93,92	96,76
Tanjungpinang	93,35	1,26	1,36	90,87	95,83
Kepulauan Riau	91,82	0,56	0,61	90,72	92,92
<b>Persentase Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas dengan Umur Perkawinan Pertama &lt; 19 Tahun</b>					
Karimun	19,16	1,82	9,52	15,59	22,74
Bintan	18,91	1,86	9,81	15,28	22,55
Natuna	33,92	2,65	7,80	28,73	39,10
Lingga	24,73	2,50	10,11	19,83	29,63
Kep. Anambas	29,92	2,68	8,97	24,66	35,18
Batam	11,03	1,19	10,77	8,70	13,36
Tanjungpinang	15,27	1,88	12,30	11,59	18,95
Kepulauan Riau	14,49	0,83	5,71	12,87	16,11
<b>Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan Dalam 2 Tahun Terakhir di Fasilitas Kesehatan</b>					
Karimun	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Bintan	96,64	2,37	2,45	92,00	101,29
Natuna	72,64	7,51	10,34	57,92	87,37
Lingga	76,16	6,42	8,43	63,58	88,74
Kep. Anambas	78,07	6,82	8,74	64,70	91,44
Batam	98,23	1,24	1,27	95,79	100,67
Tanjungpinang	99,53	0,47	0,47	98,61	100,46
<b>Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan Dalam 2 Tahun Terakhir Ditolong oleh Tenaga Kesehatan</b>					
Karimun	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Bintan	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Natuna	87,10	6,41	7,36	74,53	99,66
Lingga	99,15	0,86	0,87	97,46	100,83
Kep. Anambas	97,67	1,79	1,83	94,16	101,17
Batam	98,23	1,24	1,27	95,79	100,67
Tanjungpinang	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Kabupaten/Kota	Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (%)	Selang Kepercayaan 95%	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Angka Partisipasi Sekolah (APS) Formal dan Informal Kelompok Umur 7-12 Tahun</b>					
Karimun	99,33	0,48	0,49	98,38	100,27
Bintan	99,98	0,02	0,02	99,93	100,02
Natuna	99,34	0,66	0,67	98,04	100,64
Lingga	98,63	1,10	1,11	96,48	100,78
Kep. Anambas	99,39	0,43	0,43	98,55	100,24
Batam	99,21	0,45	0,46	98,33	100,10
Tanjungpinang	99,49	0,36	0,36	98,78	100,20
Kepulauan Riau	99,28	0,32	0,32	98,66	99,91
<b>Angka Partisipasi Sekolah (APS) Formal dan Informal Kelompok Umur 13-15 Tahun</b>					
Karimun	97,54	2,36	2,41	92,92	102,16
Bintan	99,60	0,40	0,40	98,81	100,39
Natuna	99,43	0,57	0,57	98,31	100,54
Lingga	94,33	3,26	3,46	87,94	100,73
Kep. Anambas	97,69	1,99	2,04	93,80	101,59
Batam	99,30	0,70	0,71	97,93	100,67
Tanjungpinang	99,50	0,44	0,44	98,65	100,36
Kepulauan Riau	99,01	0,52	0,53	97,98	100,03
<b>Angka Partisipasi Sekolah (APS) Formal dan Informal Kelompok Umur 16-18 Tahun</b>					
Karimun	77,10	4,88	6,33	67,54	86,66
Bintan	92,70	2,38	2,57	88,04	97,37
Natuna	75,60	5,82	7,70	64,19	87,01
Lingga	80,31	4,63	5,77	71,23	89,38
Kep. Anambas	88,25	3,83	4,34	80,75	95,75
Batam	85,12	3,18	3,74	78,89	91,35
Tanjungpinang	87,16	4,23	4,85	78,87	95,46
Kepulauan Riau	84,54	2,14	2,54	80,33	88,75

Sumber: BPS, Susenas Maret 2022

**ST 2023**  
SENSUS PERTANIAN

**DATA**  
MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Jl. A. Yani No. 21 Tanjungpinang 29124  
Telp: (0771) 4500155  
Homepage: kepri.bps.go.id Email: bps2100@bps.go.id

